



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI**



TAHUN 2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat- nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai 2021 -2026, sebagai penjabaran RPJMD Kota Binjai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai disusun sejalan dengan disahkannya Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Rencana Strategis ini juga memperhatikan dan mempedomani Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan ini kami berupaya menganalisis faktor-faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan harapan dapat menggambarkan kondisi obyektif sehingga langkah -langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran merupakan langkah riil sesuai dengan kondisi yang ada.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami harapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik berupa saran maupun kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini. Harapan kami semoga Rencana Strategis yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

Erwin Toga TP Purba, S.Sos, M.SP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 198910 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai melaksanakan tugas Wali Kota Binjai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Agar tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan suatu rencana strategis yang menjadi pedoman dalam menentukan kegiatan yang diprioritaskan untuk dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dari keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.

Dalam Renstra ini, analisis strategi yang digunakan untuk mewujudkan visi adalah formulasi SWOT (Stregths Weakness Opportunities Treats). Dari formulasi tersebut disimpulkan bahwa faktor kunci sukses pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai adalah tersedianya pedoman pelaksanaan tugas, tercukupinya sarana prasarana, tingginya ketergantungan kepada pihak luar, adanya pengawasan dan pemeriksaan eksternal dan peraturan yang selalu berubah-ubah.

Dengan memanfaatkan faktor kunci sukses ini, dirumuskan strategi untuk menyukseskan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai tahun 2021-2026 dengan memanfaatkan pedoman pelaksanaan tugas sebagai acuan kerja, mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas, pemanfaatan pengawasan eksternal untuk mengacu perbaikan administrasi dan fisik kegiatan, mengurangi ketergantungan dengan pihak luar melalui peningkatan SDM, menggunakan teknologi komputer dalam pelaksanaan tugas, mensosialisasikan perubahan sehingga tidak menghambat proses dan meningkatkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

IKHTISAR EKSEKUTIF..... ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATANDAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

2.1 Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi BPKPAD Kota Binjai ... 9

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi 9

2.1.2 Struktur Organisasi 34

2.2 Sumber Daya BPKPAD Kota Binjai 37

2.2.1 Sumber Daya Manusia 37

2.2.2 Sarana dan Prasarana 39

2.3 Kinerja Pelayanan BPKPAD Kota Binjai 41

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKPAD Kota
Binjai 46

BAB III PERMASALAHAN DAN ISI STRATEGIS PERANGKAT DERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan 48

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala
Daerah 52

3.3 Telaah Renstra K/L dan Provinsi 56

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis 56

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 58

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 61

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 67

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 70

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG HUKUM 132

BAB VIII PENUTUP 134

LAMPIRAN 1 Mengidentifikasi indicator-indikator tujuan dan sasaran dengan
Metode SMART 135

LAMPIRAN 2 Tabel T.C 29 Indikator Program yang Mengacu Pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD 136

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

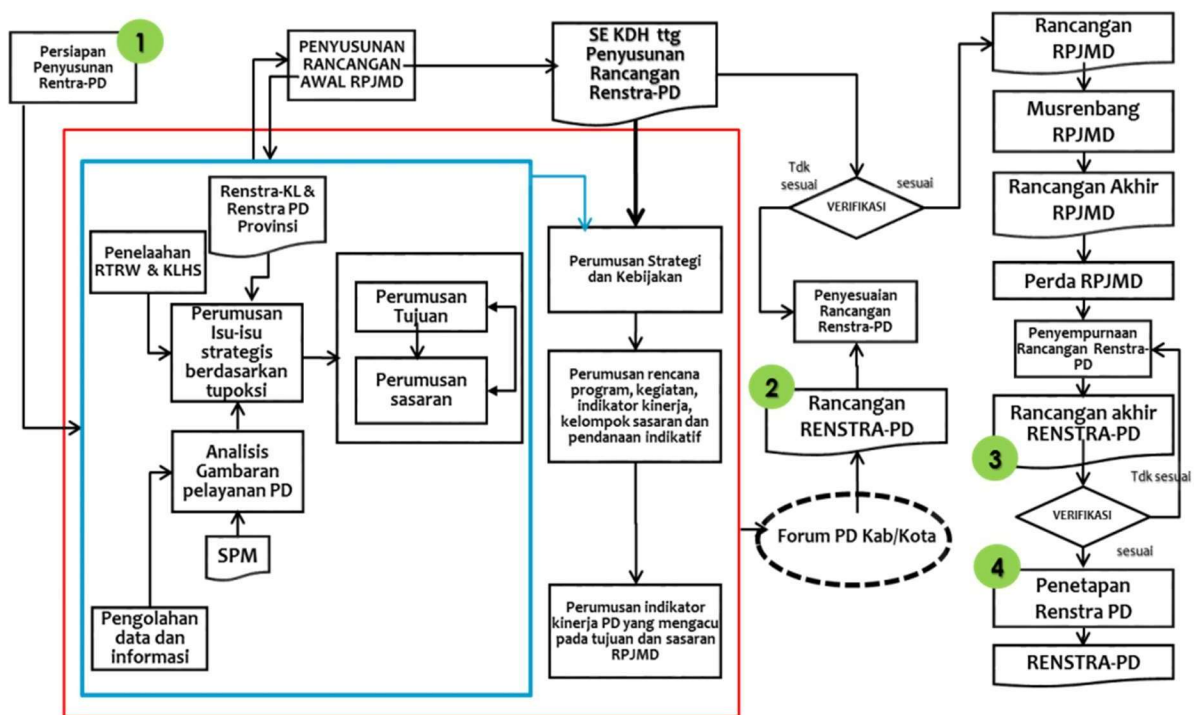
Penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 111 mencakup:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. Penutup.

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota Binjai untuk 5 (lima) tahun mendatang. Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi. Isu Stategis RPJMD 2021-2026 dan isu strategis BPKPAD menjadi acuan dalam penyusunan Renstra BPKPAD sehingga terjadi sinkronisasi antara dokumen RPJMD dengan dokumen Renstra BPKPAD.

Penyusunan rencana aksi mempertimbangkan potensi sumber daya manusia, kemampuan keuangan daerah, peralatan yang dimiliki dan potensi lain yang ada di BPKPAD. Dengan melihat potensi tersebut akan dapat mengukur kemampuan tiap tahun dalam penentuan target yang akan dicapai.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1.1

Kerangka Pikir Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026

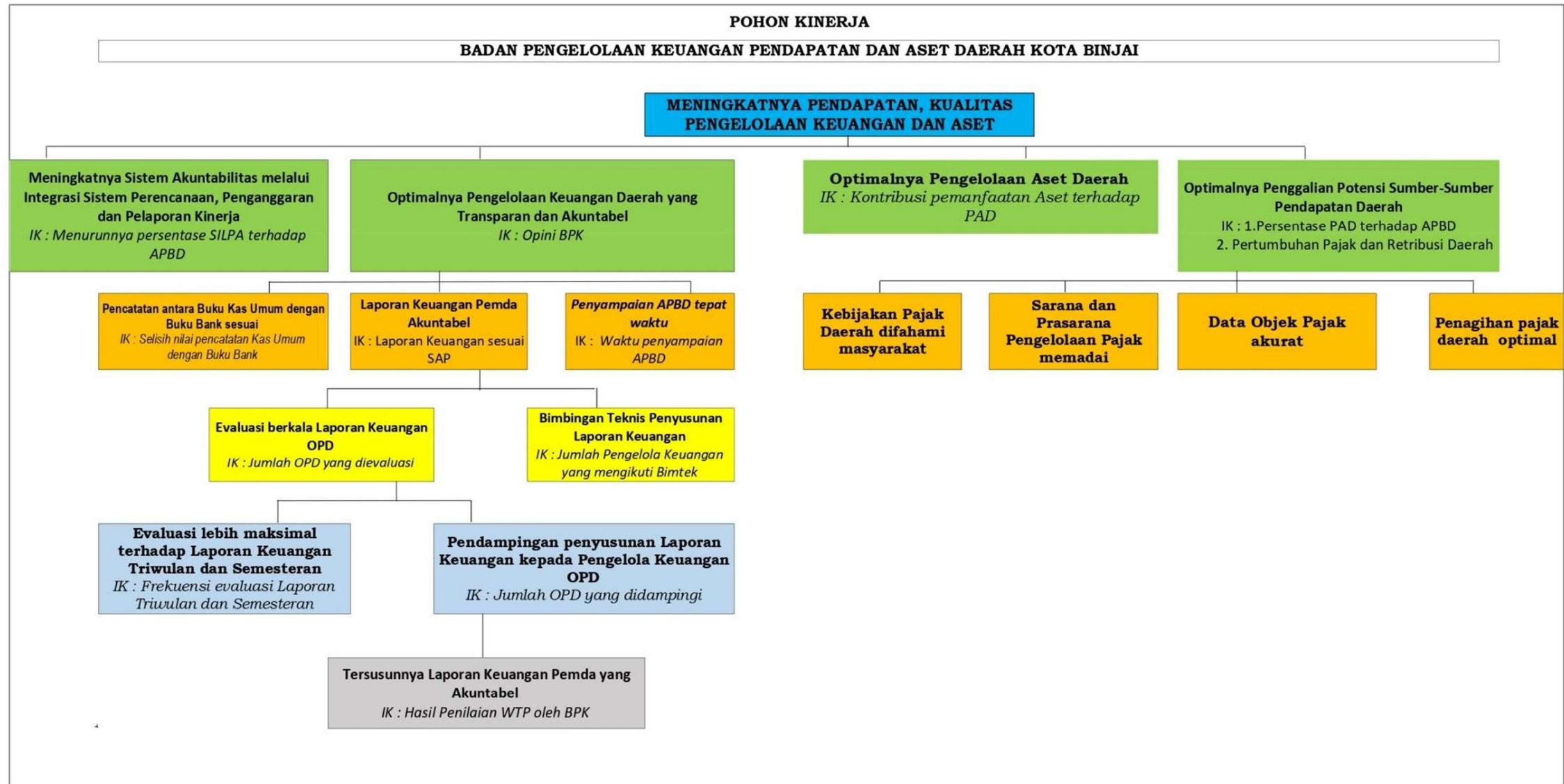
Permasalahan Umum yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai adalah Migrasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dari SIMDA ke SIPD masih dalam tahap penyempurnaan, Produk hukum daerah tentang tarif retribusi belum diperbarui/direvisi dan belum optimalnya penggalan potensi sumber pendapatan daerah. Permasalahan-permasalahan umum tersebut jika disimpulkan akan memunculkan permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang berubah dan belum optimal
2. Produk hukum daerah tentang tarif retribusi belum diperbarui/direvisi

3. Belum optimalnya penggalian potensi sumber pendapatan daerah
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Dengan disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ini diharapkan seluruh permasalahan yang dihadapi akan dapat diatasi secara komprehensif.

Melihat dari latar belakang di atas dapat dijelaskan fungsi dan tugas dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai sesuai dengan pohon kinerja berikut :



1.2. Landasan Hukum

Renstra BPKPAD Kota Binjai Tahun 2021-2026 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binja Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.
12. Surat Edaran Wali Kota Binjai Nomor 050-4319 perihal Penyusunan Rancangan Awal Strategis Perangkat Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Secara keseluruhan, tujuan penyusunan Renstra BPKPAD Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah gambaran rencana pelaksanaan pembangunan BPKPAD Kota Binjai selama 5 (lima) tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan penyusunan renstra ini khususnya adalah:

1. Mengidentifikasi (review) secara menyeluruh kondisi BPKPAD Kota Binjai melalui pengukuran pelayanan/kinerja periode yang lalu.
2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi BPKPAD Kota Binjai Tahun 2021-2026.
3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan BPKPAD Kota Binjai Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan Renstra BPKPAD Kota Binjai tahun 2021-2026 ini adalah agar dapat:

1. Teridentifikasinya kondisi BPKPAD Kota Binjai melalui pengukuran pelayanan/kinerja terkini;
2. Tersusunnya strategi dan arah kebijakan BPKPAD Kota Binjai Tahun 2021-2026;
3. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BPKPAD Kota Binjai Tahun 2021-2026 berdasarkan kerangka pendanaan indikatif.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (Renstra BPKPAD) Kota Binjai Tahun 2021-2026, disusun melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKPAD KOTA BINJAI

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPKPAD Kota Binjai.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPKPAD KOTA BINJAI

Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPKPAD Kota Binjai, telaahan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai , telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kota Binjai Tahun 2010-2030, telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga, serta penentuan isu-isu strategis BPKPAD Kota Binjai.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKPAD Kota Binjai

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi strategi dan arah kebijakan BPKPAD Kota Binjai dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indicator kinerja BPKPAD Kota Binjai yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada Perubahan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026

BAB VIII PENUTUP

Berisi ringkasan perubahan renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra BPKPAD Tahun 2021-2026

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Dan Struktur Organisasi BPKPAD Kota Binjai

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan daerah Kota Binjai merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan fungsi dan tugas mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang.

2.1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai dan Peraturan Walikota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai mempunyai tugas pokok sebagai berikut: Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Binjai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan dan Aset Daerah.

Adapun untuk melaksanakan tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. Melaksanakan penyusunan Rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- d. Melaksanakan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, pendapatan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tata laksana kantor;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penagihan PBB, BPHTB, retribusi dan pajak daerah lainnya;
- g. Melakukan koordinasi penyusunan rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengembangannya (ekstensifikasi/intensifikasi);
- h. Menyiapkan rencana kebijakan dan atau strategi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembayaran penagihan PBB, BPHTB, Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya;
- i. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- j. Melaksanakan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- k. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Melakukan pengujian atas penagihan dan memerintahkan pembayaran;
- m. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- n. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- o. Melaksanakan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dan yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, penghimpunan data dan perencanaan penyusunan program kerja badan serta urusan umum lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. menyusun program dan rencana kerja;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, pengadaan barang, inventarisasi barang serta melakukan perawatan dan pemeliharaan;
- f. mempersiapkan, menghimpun, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan acuan dalam menyusun program kerja badan;
- g. menyusun rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban, mengelola urusan keuangan serta membuat laporan keuangan badan;
- h. menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
- i. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- j. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Program

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup program;

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbagian Program mempunyai fungsi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- b. menyusun program kegiatan Badan Pengelolaan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- c. menyusun program kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

- d. membuat laporan secara berkala dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- e. menyusun rencana penggunaan anggaran kas;
- f. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- b. melaksanakan urusan keuangan, pembukuan keuangan, laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan badan;
- c. menyusun dan mengajukan anggaran belanja pegawai dan anggaran belanja lainnya;
- d. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- b. mengelola ketatatusahaan dan surat menyurat;
- c. mengelola administrasi umum;

- d. melaksanakan kegiatan di bidang perlengkapan, kerumahtanggaan dan pengadaan barang;
- e. mengelola administrasi kepegawaian;
- f. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- g. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Kepala Badan di Bidang Perbendaharaan yang meliputi perbendaharaan belanja langsung, perbendaharaan belanja tidak langsung dan administrasi dan pelaporan perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. menyusun program dan rencana kerja;
- b. membina ketatausahaan keuangan dari setiap SKPD;
- c. melakukan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- d. menyiapkan uang daerah;
- e. menyiapkan dokumen pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- f. mencatat penerimaan dan pengeluaran daerah setiap hari;
- g. menyusun laporan kas daerah yang menyajikan saldo rekening kas daerah di bank;
- h. melaksanakan pencocokan saldo kas daerah menurut pembukuan dengan saldo kas daerah menurut pembukuan bank;
- i. menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- j. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung

Kepala Subbidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan lingkup perbendaharaan belanja tidak langsung.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. menghitung, menyusun dan mengusulkan rencana anggaran gaji ASN pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Binjai;
- c. memeriksa daftar gaji, kekurangan gaji, gaji susulan yang diajukan oleh bendahara SKPD;
- d. menyiapkan buku register gaji;
- e. melakukan verifikasi atas keputusan gaji pegawai dan penerbitan SKPP bagi yang pensiun, meninggal dan pindah tugas ke luar kota Binjai;
- f. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Perbendaharaan Belanja Langsung

Kepala Subbidang Perbendaharaan Belanja Langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan lingkup perbendaharaan belanja langsung.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbidang Perbendaharaan Belanja Langsung mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meneliti kelengkapan dari Surat Perintah Membayar (SPM) belanja langsung dari setiap SKPD;
- c. melaksanakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), Langsung (LS) dan Nihil dari setiap SKPD;
- d. membuat, menghimpun dan meneliti realisasi dana dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e. menyiapkan buku register belanja langsung;
- f. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Administrasi dan Pelaporan Perbendaharaan

Kepala Administrasi dan Pelaporan Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan lingkup Verifikasi Dana Transfer dan Pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbidang Administrasi dan Pelaporan Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan laporan SP2D yang telah diterbitkan;
- c. membuat, menghimpun, meneliti dan melaporkan realisasi dana dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- d. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- e. mengelola penyusunan realisasi anggaran berdasarkan laporan SKPD sebagai bahan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan anggaran;
- f. melaksanakan kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan agar tugas-tugas terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menyiapkan surat keputusan penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD;
- h. membuat laporan hasil pelaksanaan kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya;
- i. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. menyusun program dan rencana kerja;
- b. melaksanakan administrasi keuangan daerah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis keuangan daerah;
- c. mengumpulkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan APBD;
- d. melakukan pembinaan penyusunan RKA setiap SKPD;
- e. mendata dan mengkompilasi usulan RKA-SKPD;

- f. menyiapkan nota keuangan yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. menyiapkan penyusunan Ranperda APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- h. menyusun rencana anggaran kas SKPD;
- i. melaksanakan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- j. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Belanja Tidak Langsung

Kepala Subbidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Anggaran lingkup anggaran Belanja Tidak Langsung.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbidang Belanja Tidak Langsung mempunyai fungsi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- b. menyajikan informasi belanja tidak langsung;
- c. melaksanakan pengumpulan data-data belanja pegawai dari setiap SKPD yang diperlukan untuk penyusunan APBD;
- d. melakukan perencanaan dan penyusunan program kerja belanja tidak langsung pada kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- e. melaksanakan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) belanja tidak langsung;
- f. menyusun rencana anggaran kas belanja tidak langsung;
- g. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Belanja Langsung

Kepala Subbidang Belanja Langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Anggaran lingkup anggaran Belanja Langsung.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbidang Belanja Langsung mempunyai fungsi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan daerah;
- c. mengumpulkan data-data belanja yang berkaitan dengan penyusunan APBD dan PAPBD dari setiap SKPD;
- d. melakukan perencanaan dan penyusunan program kerja belanja langsung pada kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- e. melaksanakan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung;
- f. membuat dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
- g. menyusun anggaran kas SKPD belanja langsung;
- h. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Verifikasi Anggaran Belanja dan Pendapatan

Kepala Subbidang Verifikasi Anggaran Belanja dan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Anggaran lingkup Verifikasi Anggaran Belanja dan Pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbidang Verifikasi Anggaran Belanja dan Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun dan melaksanakan kegiatan verifikasi Anggaran Belanja dan Pendapatan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan daerah;
- c. melakukan verifikasi terhadap Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dari masing-masing SKPD untuk penyusunan APBD dan PAPBD;
- d. mengumpulkan seluruh sumber-sumber pendapatan daerah serta melakukan verifikasi terhadap pendapatan yang berasal dari SKPD pengelola pendapatan untuk penyusunan APBD dan PAPBD;
- e. melakukan verifikasi terhadap penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah;
- f. melakukan perencanaan dan penyusunan program kerja verifikasi anggaran belanja dan pendapatan pada kegiatan Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- g. menyiapkan surat keputusan besaran Uang Persediaan (UP) SKPD;
- h. memberikan penilaian atas prestasi kerja/kinerja bawahan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Kepala Badan di bidang akuntansi yang meliputi akuntansi pendapatan dan akuntansi belanja serta pelaporan pendapatan dan pelaporan belanja, melaksanakan pembinaan kepada SKPD dalam penatausahaan pertanggungjawaban dan Laporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. menyusun program dan rencana kerja;

- b. melaksanakan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- c. mempersiapkan rencana kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- d. menyusun laporan keuangan triwulan dan semesteran;
- e. menyiapkan bahan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- f. melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas SPM UP, GU, dan TU;
- g. melakukan pembinaan terhadap bendahara SKPD dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan BPKP dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah;
- i. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja

Kepala Subbidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Akuntansi lingkup akuntansi pendapatan dan belanja.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja mempunyai fungsi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja;
- b. menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan akuntansi pendapatan dan belanja;
- c. menyusun rencana kebijakan akuntansi pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas SPM UP, GU, dan TU;

- e. melakukan pengujian dan pemeriksaan serta penelitian pengesahan laporan fungsional SKPD atas SP2D yang telah terbit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyiapkan bahan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban APBD;
- g. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Pelaporan Pendapatan dan Belanja

Kepala Subbidang Pelaporan Pendapatan dan Belanja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Akuntansi lingkup pelaporan pendapatan dan belanja.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbidang Pelaporan Pendapatan dan Belanja mempunyai fungsi:

- a. menyusun program dan rencana kerja;
- b. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan daerah;
- c. melaksanakan konsolidasi laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKS-KPD);
- d. menyusun dan menyiapkan laporan keuangan triwulan dan semesteran;
- e. melakukan konsolidasi atau rekonsiliasi laporan keuangan dengan BUMD dan BLUD;
- f. melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- g. melakukan pembinaan terhadap bendahara SKPD dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
- h. melakukan evaluasi pelaporan pertanggungjawaban fungsional pada SKPD;

- i. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Kepala Subbidang Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Akuntansi di lingkup pelaporan pendapatan dan belanja daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbidang Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. menyusun program dan rencana kerja;
- b. menyiapkan sistem dan prosedur pelaporan keuangan Daerah;
- c. menyajikan informasi yang berhubungan dengan akuntansi pendapatandan belanja daerah;
- d. menyajikan informasi realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e. mempersiapkan peringatan /teguran atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD ;
- f. menyiapkan bahan laporan keuangan dalam rangkapertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang PBB dan BPHTB

Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam bidang PBB dan BPHTB lingkup perencanaan, pendataan, penetapan, pemungutan, keberatan dan ekstensifikasi/intensifikasi serta penatausahaan PBB dan BPHTB.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kerja;
- b. menyusun rencana dan program ekstensifikasi/intensifikasi PBB dan BPHTB;
- c. merumuskan konsep kebijakan dan petunjuk teknis kegiatan Bidang PBB dan BPHTB;
- d. mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- e. melakukan koordinasi, pengendalian dan pengawasan kegiatan bawahan;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan/penagihan Pajak Bumi dan Bangunan beserta tunggakannya;
- h. melakukan prosedur penelitian SSPD BPHTB dan memvalidasi SSPD BPHTB;
- i. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang PBB dan BPHTB;
- j. merumuskan penyusunan RKA dan melaksanakan DPA;
- k. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Pelayanan PBB dan BPHTB

Kepala Subbidang Pelayanan PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang PBB dan BPHTB lingkuppendataan, pendaftaran dan eksentifikasi/intensifikasi.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbidang Pelayanan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kerja;

- b. menyusun konsep kebijakan dan petunjuk teknis dilingkup Subbidang Pelayanan PBB dan BPHTB;
- c. mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- d. melaksanakan pendaftaran wajib pajak dan melaksanakan sistem pembayaran online PBB-P2;
- e. melaksanakan pemutakhiran data potensi PBB dan BPHTB;
- f. melaksanakan penelitian dalam rangka ekstensifikasi/intensifikasi PBB dan BPHTB;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbidang Pelayanan PBB dan BPHTB;
- h. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Penetapan PBB dan BPHTB

Kepala Subbidang Penetapan PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang PBB dan BPHTB lingkup penetapan dan penagihan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbidang Penetapan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kerja;
- b. menyusun konsep kebijakan dan petunjuk teknis dilingkup Subbidang Penetapan PBB dan BPHTB;
- c. menyusun rencana pendapatan daerah dari sektor PBB dan BPHTB;
- d. mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- e. mengkoordinasikan penelitian SSPD BPHTB;

- f. melaksanakan urusan penerbitan dan pembetulan SPPT, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil;
- g. menyusun laporan realisasi dan piutang PBB dan BPHTB;
- h. mengkoordinasikan penagihan PBB-P2;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbidang Penetapan PBB dan BPHTB;
- j. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Pengendalian PBB dan BPHTB

Kepala Subbidang Pengendalian PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang PBB dan BPHTB lingkup Pengendalian PBB dan BPHTB.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbidang Pengendalian PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kerja;
- b. menyusun konsep kebijakan dan petunjuk teknis dilingkup Subbidang Pengendalian;
- c. mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan kepadabawahan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, analisa dan evaluasi, serta penyuluhan dan keberatan pajak;
- e. mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi kepatuhan wajibpajak PBB dan BPHTB;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

- g. melaksanakan penyuluhan, bimbingan, atau himbauan tentang PBB dan BPHTB;
- h. melaksanakan konsultasi teknis perpajakan PBB dan BPHTB;
- i. melaksanakan urusan keberatan ketetapan, pengurangan, dan restitusi PBB dan BPHTB;
- j. melaksanakan penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengendalian;
- l. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya

Kepala Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya yang lingkup perencanaan, ekstensifikasi/intensifikasi serta penatausahaan retribusi dan pajak daerah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kerja;
- b. menyusun rencana dan program peningkatan retribusi dan pajak daerahlainnya;
- c. merumuskan konsep kebijakan dan petunjuk teknis kegiatan Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya;
- d. menyiapkan bahan dan data pengkajian ekstensifikasi/intensifikasi potensi retribusi dan pajak daerah lainnya;

- e. mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- f. melakukan koordinasi dan pengendalian kegiatan bawahan;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemungutan /penagihan retribusi daerah;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan/penagihan pajak daerah lainnya beserta tunggaknya;
- i. melaksanakan penghitungan penerimaan retribusi dan pajak daerah lainnya;
- j. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta indikator kinerja Bidang retribusi dan Pajak Daerah Lainnya;
- k. merumuskan penyusunan RKA dan melaksanakan DPA;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya;
- m. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan;dan
- n. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Pelayanan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya

Kepala Subbidang Pelayanan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya lingkup pendaftaran, pendataan dan ekstensifikasi/intensifikasi retribusi dan pajak daerah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbidang Pelayanan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kerja;
- b. menyusun konsep kebijakan dan petunjuk teknis di lingkup Subbidang Pelayanan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya;

- c. mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- d. melakukan pendataan dan penjaringan potensi retribusi dan pajak daerah lainnya;
- e. menetapkan pajak daerah sesuai standard operasional pajak daerah;
- f. menerbitkan dan mendistribusikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada wajib pajak;
- g. melaksanakan pendaftaran wajib pajak;
- h. membuat surat teguran kepada wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah dan terhadap wajib pajak daerah yang tidak menyampaikan SPTPD;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbidang Pelayanan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya;
- j. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Penetapan Pajak Daerah Lainnya

Kepala Subbidang Penetapan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya lingkup penetapan, penagihan dan pemungutan pajak daerah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Penetapan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kerja;
- b. menyusun konsep kebijakan dan petunjuk teknis di lingkup Subbidang Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
- c. menyusun rencana pendapatan daerah dari sektor pajak daerah lainnya;
- d. mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;

- e. melaksanakan verifikasi data kelengkapan pembayaran pajak (*self assesment*);
- f. melaksanakan penghitungan pajak daerah (*office assesment*);
- g. melaksanakan urusan penerbitan dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Tagihan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil;
- h. melaksanakan penagihan piutang pajak daerah lainnya;
- i. membuat laporan realisasi penerimaan dan piutang dari pajak daerahlainnya;
- j. mengumpulkan bahan, mengkaji dan menyusun konsep rancangan produk hukum pajak daerah lainnya;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbidang Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
- l. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya

Kepala Subbidang Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya lingkup Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbidang Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kerja;

- b. menyusun konsep kebijakan dan petunjuk teknis di lingkup Subbidang Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya;
- c. mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- d. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemeriksaan atau penertiban, pembongkaran, penyegehan, terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak daerah lainnya;
- e. melaksanakan pengendalian reklame insidentil;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional retribusi dan pajak daerah lainnya;
- h. melaksanakan penyuluhan, bimbingan, atau himbauan tentang retribusidan pajak daerah lainnya;
- i. melaksanakan urusan keberatan ketetapan, pengurangan, dan restitusipajak daerah lainnya;
- j. melaksanakan penghapusan piutang pajak;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya;
- l. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan;dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah di bidang Aset yang meliputi pendataan aset daerah dan optimalisasi aset daerah serta Pengendalian Aset Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. menyusun program dan rencana kerja;
- b. melaksanakan penatausahaan dan pelaporan aset daerah berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan inventarisasi dan koordinasi dalam hal legalisasi aset daerah;
- e. menyiapkan surat keputusan penunjukan pengurus barang pengguna dan pengguna barang SKPD serta pejabat pengelolaan barang milik daerah;
- f. melaksanakan arsip dan pengamanan surat-surat berharga aset daerah;
- g. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Pendataan Aset Daerah

Kepala Subbidang Pendataan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah lingkup Pendataan Aset Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbidang Pendataan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja;
- b. melaksanakan inventarisasi dan pendataan seluruh aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- c. menyusun usulan surat keputusan penunjukan pengurus barang pengguna dan pengguna barang SKPD serta pejabat pengelolaan barang milik daerah;

- d. melaksanakan Penatausahaan Aset Daerah;
- e. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Optimalisasi Aset Daerah

Kepala Subbidang Optimalisasi Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah lingkup Optimalisasi Aset Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbidang Optimalisasi Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja;
- b. melaksanakan pengkajian terhadap penggunaan aset-aset Pemerintah Daerah dan menyiapkan berkas aset daerah yang akan disertifikasi;
- c. melaksanakan Penghapusan barang yang sudah tidak layak pakai dan pemutihan data aset;
- d. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Pengendalian Aset Daerah

Kepala Subbidang Pengendalian Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah lingkup Bidang Pengendalian Aset Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbidang Pengendalian Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh aset Pemerintah Daerah;

- c. melaksanakan pengendalian aset pemerintah daerah;
- d. merencanakan penilaian Barang Milik Daerah.
- e. memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan tugas pokok yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Aspek administrasi Keuangan Daerah, tugasnya meliputi:
 - a. Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pelayanan administrasi pengendalian dan koordinasi belanja daerah;
 - b. Pengkajian kebutuhan daerah;
 - c. Pelaksanaan pengawasan teknis pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik di bidang pendapatan dan belanja daerah;
 - e. Penyelenggaraan sistem informasi keuangan dan aset daerah;
 - f. Pembinaan dan bimbingan di bidang pendapatan, belanja dan aset daerah.
2. Aspek Pendapatan Daerah, tugasnya meliputi:
 - a. Melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis Pemerintah Daerah di bidang pendapatan;
 - b. Menyelenggarakan urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum di bidang pendapatan;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan.
3. Aspek Pengelolaan Aset Daerah, tugasnya meliputi:
 - a. Penyusunan perumusan, perencanaan bidang aset daerah;

- b. Koordinasi perencanaan analisa kebutuhan pengadaan aset, pendataan, penginventarisasian dan pencatatan aset;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset daerah;
- d. Penyusunan database aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Binjai;
- e. Penyusunan laporan realisasi dan kinerja dibidang aset daerah.

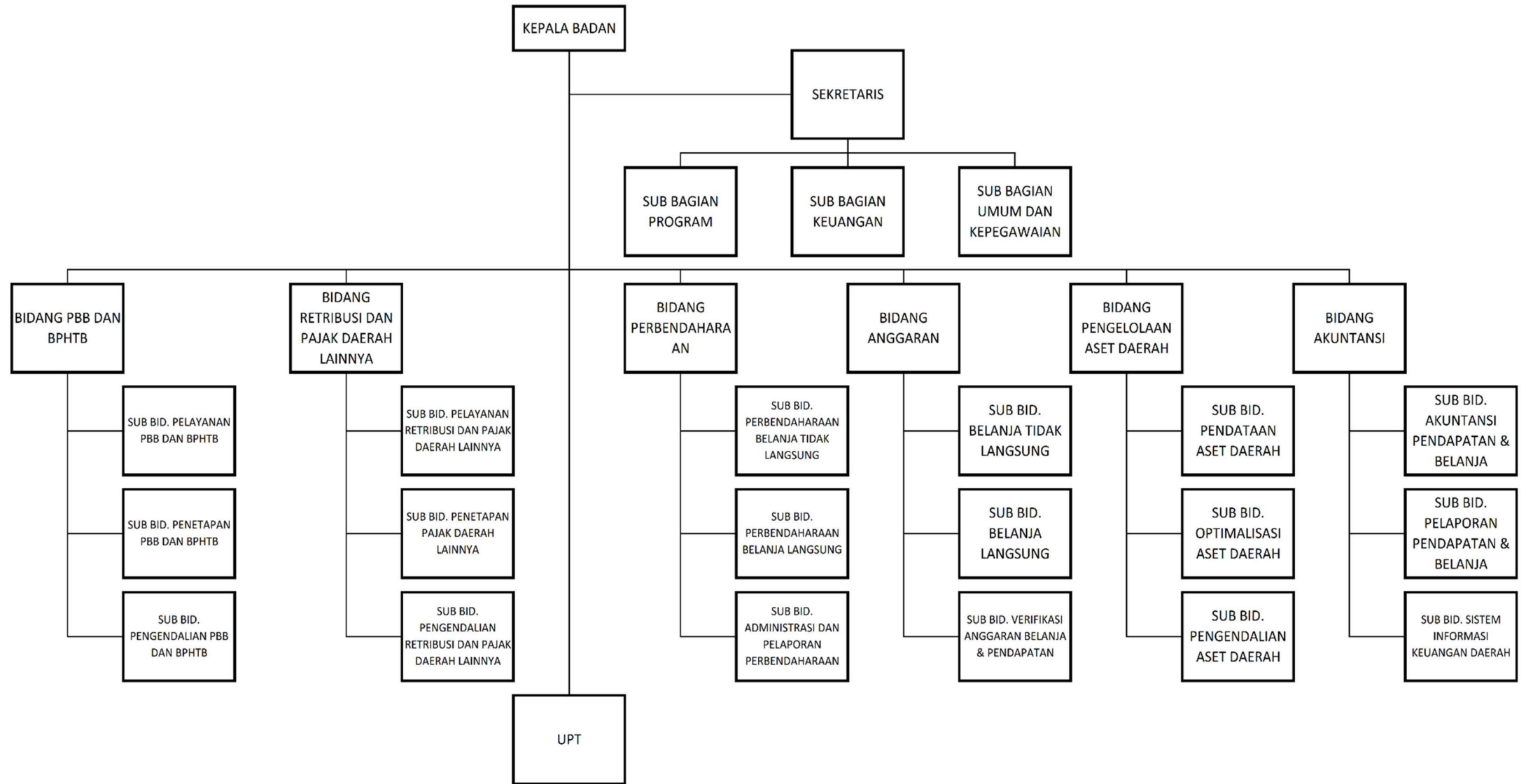
2.1.2. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kependudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari:

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Program;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - a) Subbidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung;
 - b) Subbidang Perbendaharaan Belanja Langsung; dan
 - c) Subbidang Administrasi dan Pelaporan Perbendaharaan.
- 4. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - a) Subbidang Belanja Tidak Langsung;
 - b) Subbidang Belanja Langsung; dan
 - c) Subbidang Verifikasi Anggaran Belanja dan Pendapatan.
- 5. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - a) Subbidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
 - b) Subbidang Pelaporan Pendapatan dan Belanja; dan
 - c) Subbidang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

6. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari:
 - a) Subbidang Pelayanan PBB dan BPHTB;
 - b) Subbidang Penetapan PBB dan BPHTB; dan
 - c) Subbidang Pengendalian PBB dan BPHTB.
7. Bidang Retribusi dan Pajak Daerah lainnya, terdiri dari:
 - a) Subbidang Pelayanan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya;
 - b) Subbidang Penetapan Pajak Daerah Lainnya; dan
 - c) Subbidang Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya.
8. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari:
 - a) Subbidang Pendapatan Aset Daerah;
 - b) Subbidang Optimalisasi Aset Daerah; dan
 - c) Subbidang Pengendalian Aset Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan 2.1.
Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai



2.2. Sumber Daya BPKPAD Kota Binjai

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPKPAD Kota Binjai didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada Tahun 2021, jumlah Pegawai Negeri Sipil BPKPAD Kota Binjai adalah sebanyak 116 orang. Jumlah dan komposisi pegawai BPKPAD Kota Binjai dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Jumlah dan Distribusi Pegawai BPKPAD Kota Binjai Tahun 2021

No	Struktur Jabatan/Kepegawaian	Kondisi Saat Ini		
		Jumlah	Status	Pendidikan
1.	Kepala Badan	1	PNS	S1 Ekonomi
2.	Sekretaris	1	PNS	S1 Ekonomi
	• Subbag Program	1	PNS	S1 Sosial
	• Subbag Keuangan	1	PNS	S1 Ekonomi
	• Subbag Umum dan Kepegawaian	1	PNS	SMA
	• Staf	12	PNS	SMA/Sarjana
3	Kabid Anggaran	1	PNS	S1 Agro Bisnis
	• Kasubbid Belanja Tidak Langsung	1	PNS	S1 Sosial
	• Kasubbid Belanja Langsung	1	PNS	S1 Ekonomi
	• Kasubbid Verifikasi Anggaran Belanja dan Pendapatan	1	PNS	S1 Ekonomi
	• Staf	9	PNS	SMA/Sarjana
4	Kabid Perbendaharaan	1	PNS	S1 Sosial
	• Kasubbid Perbendaharaan BTL	1	PNS	S1 Sosial
	• Kasubbid Perbendaharaan BL	1	PNS	S1 Ekonomi
	• Kasubbid Administrasi dan Pelaporan Perbendaharaan	1	PNS	S1 Ekonomi
	• Staf	13	PNS	SMA/Sarjana
5	Kabid Akuntansi	1	PNS	Magister Ilmu Pemerintahan
	• Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Belanja	1	PNS	S1 Ekonomi

	• Kasubbid Pelaporan Pendapatan dan Belanja			
	• Kasubbid Sistem Informasi Keuangan Daerah	1	PNS	S1 Ekonomi
	• Staf	11	PNS	SMA/Sarjana
6	Kabid PBB dan BPHTB	1	PNS	S1 Sosial
	• Kasubbid Pelayanan PBB dan BPHTB	1	PNS	S1 Hukum
	• Kasubbid Penetapan PBB dan BPHTB	1	PNS	S1 Ekonomi
	• Kasubbid Pengendalian PBB dan BPHTB	1	PNS	S1 Sosial
	• Staf	17	PNS	SMA/Sarjana
7	Plt Kabid Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya	1	PNS	S1 Ekonomi
	• Kasubbid Pelayanan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya	1	PNS	S1 Sosial
	• Kasubbid Penetapan Pajak Daerah Lainnya	1	PNS	S1 Sosial
	• Kasubbid Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya	1	PNS	S1 Ekonomi
	• Staf	14	PNS	SMA/Sarjana
8	Kabid Pengelolaan Aset Daerah	1	PNS	Magister Manajemen
	• Kasubbid Pendataan Aset Daerah	1	PNS	S1 Hukum
	• Kasubbid Optimalisasi Aset Daerah	1	PNS	S1 Ekonomi
	• Kasubbid Pengendalian Aset Daerah	1	PNS	S1 Ekonomi
	• Staf	12	PNS	SMA/Sarjana
9	Pegawai Tidak Tetap	84	Non PNS	SMA/Sarjana

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKPAD Kota Binjai, 2021

Tabel 2.2.
PNS BPKPAD Kota Binjai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	6
2	Golongan III	87
3	Golongan II	23
4	Golongan I	-
Jumlah		116

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKPAD Kota Binjai, 2021

Tabel 2.3.
PNS BPKPAD Kota Binjai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana	5
2	Sarjana	79
3	Akademi/D3	6
4	SLTA	26
5	SLTP	
6	SD	-
Jumlah		116

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKPAD Kota Binjai, 2021

Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sudah cukup tinggi, namun jika ditinjau dari aspek komposisi pegawai pada saat ini khususnya dalam sudut pandang status dan penempatan pejabat/pegawai belum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan.

2.2.2. Sarana Dan Prasarana

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai memiliki sarana dan prasarana antara lain bangunan fisik berupa gedung yang memiliki 2 (dua) lantai yang bertempat di Jalan Jambi Kel. Rambung Barat Kec. Binjai Selatan. Selain itu untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas kedinasan, BPKPAD memiliki barang-barang inventaris seperti komputer, laptop, printer, lemari filing Kabinet, meja, kursi, sofa, kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua untuk menunjang pekerjaan maupun pelayanan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah Kota Binjai.

Tabel 2.4.
Sarana dan Prasarana BPKPAD Kota Binjai

NO		JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai	1.047	5.976.532.799,69
	ALAT BESAR	2	242.092.000,00
	- electric generating set lainnya (dst)	2	242.092.000,00
	KOMPUTER	234	2.417.249.269,99
	- Mainframe (Komputer Jaringan)	3	216.035.302,00
	- Komputer Jaringan lainnya	1	12.210.000,00
	- P.C Unit	77	789.600.857,00
	- Lap Top	40	383.924.615,00
	- CPU (Peralatan Mainframe)	2	14.168.000,00
	- Hard Disk	6	8.890.000,00
	- Peralatan Minikomputer lainnya	2	2.460.000,00

	-	Monitor	3	9.660.750,00
	-	Printer (Peralatan Personal Komputer)	67	555.145.585,99
	-	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	11.219.306,00
	-	External	9	15.411.162,00
	-	Peralatan Personal Komputer lainnya	8	5.055.000,00
	-	Server	2	144.925.105,00
	-	Router	3	14.508.706,00
	-	Hub	3	8.959.706,00
	-	Peralatan Jaringan lainnya	6	225.075.175,00
		ALAT EKSPLORASI	1	24.900.000,00
	-	Distance Meter Electronic	1	24.900.000,00
		ALAT ANGKUTAN	19	1.497.666.950,00
	-	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	269.478.600,00
	-	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3	808.035.000,00
	-	Pick Up	1	146.280.000,00
	-	Sepeda Motor	13	201.873.350,00
	-	Mobil Unit Visual Mini (MUVIANI)	1	72.000.000,00
		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	2	2.731.350,00
	-	Mesin Bor	1	1.855.175,00
	-	Mesin Gerinda	1	876.175,00
		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	781	1.743.376.146,40
	-	Lemari Besi/Metal	36	105.920.065,00
	-	Lemari Kayu	22	125.219.730,00
	-	Rak Besi	1	455.000,00
	-	Filing Cabinet Besi	34	68.485.035,00
	-	Brandkas	3	98.900.000,00
	-	Kontainer	1	969.000,00
	-	Lemari Kaca	1	35.773.700,00
	-	CCTV - Camera Control Television System	12	18.141.228,00
	-	Papan Visual/Papan Nama	83	39.941.675,00
	-	Alat Penghancur Kertas	9	22.014.466,65
	-	Alat Pencetak Label	2	75.000.000,00
	-	Overhead Projector	1	13.750.000,00
	-	LCD Projector/Infocus	1	10.000.000,00
	-	Alat Kantor Lainnya	5	26.975.000,00
	-	Meja Kerja Kayu	43	36.670.500,00
	-	Meja Rapat	1	19.550.000,00
	-	Meja Resepsionis	1	41.273.800,00
	-	Meja 1/2 Biro	99	147.019.240,00
	-	Kursi Rapat	35	22.332.450,00
	-	Kursi Tamu	5	35.700.430,00
	-	Kursi Putar	149	113.822.370,00
	-	Kursi Biasa	5	5.032.500,00
	-	Bangku Tunggu	6	27.500.000,00
	-	Meja Komputer	8	8.517.350,00
	-	Sofa	2	35.026.060,00
	-	Lemari Es	2	5.096.350,00
	-	A.C. Window	10	52.428.259,15
	-	A.C. Split	34	155.947.280,00
	-	Kipas Angin	3	3.407.250,00
	-	Exhaust Fan	6	3.343.050,00
	-	Televisi	3	8.928.238,00
	-	Loudspeaker	5	10.060.000,00

	-	Sound System	1	10.529.750,00
	-	Microphone	1	10.870.920,60
	-	Unit Power Supply	15	116.664.025,00
	-	Camera Video	2	10.204.930,00
	-	Lambang Garuda Pancasila	1	1.639.000,00
	-	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4	3.490.000,00
	-	Tiang Bendera	1	28.734.500,00
	-	Tangga Aluminium	1	2.031.175,00
	-	Dispenser	4	4.661.184,00
	-	DVD Player	55	53.768.000,00
	-	Alat Rumah Tangga Lain-lain	9	8.437.925,00
	-	Hidran Kebakaran	2	4.900.000,00
	-	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	17.500.000,00
	-	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	23.085.640,00
	-	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4	16.240.250,00
	-	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	14	24.963.570,00
	-	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	20	8.245.250,00
	-	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	1.960.000,00
	-	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	10	22.250.000,00
		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	5	34.235.460,30
	-	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	500.000,00
	-	Layar Film/Projector	1	9.000.000,00
	-	Alat Studio Pemetaan lainnya	2	19.300.000,00
	-	Facsimile	1	5.435.460,30
		ALAT PERSENJATAAN	3	14.281.623,00
	-	Finger Print Camera	3	14.281.623,00
			1.047	5.976.532.799,69

2.3. Kinerja Pelayanan BPKPAD Kota Binjai

Secara garis besar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKPAD Kota Binjai, kinerja pelayanan yang dicapai selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut;

1. Tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
2. Tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD;
3. Tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
4. Tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
5. Terlaksananya pengelolaan dan penatausahaan belanja tidak langsung PPKD sesuai dengan ketentuan;
6. Terlaksananya pengelolaan Belanja Hibah dan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan;

7. Terlaksananya pengelolaan dan penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya;
8. Terlaksananya pendampingan penyusunan laporan keuangan PD se-Kota Binjai;
9. Kelancaran dan peningkatan kualitas jaringan SIMDA Keuangan;
10. Tersusunnya pertanggungjawaban APBD Kota Binjai;
11. Terinventarisasinya tanah milik pemerintah Kota Binjai;
12. Terlaksananya penghapusan barang-barang inventaris dan bangunan/gedung milik Pemerintah Kota Binjai;
13. Terlaksananya bimtek penilaian barang milik daerah;
14. Terlaksananya operasi sisir dan operasi pencapaian target;
15. Terlaksananya pemutkahiran data peta PBB Kota Binjai;
16. Terpeliharanya sistem IT PBB dan PAD (SIMPATDA);
17. Terlaksananya operasi penertiban pajak daerah;
18. Terdatanya potensi pajak daerah;
19. Terlaksananya TPTGR Kota Binjai

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya BPKPAD Kota Binjai, pencapaian kinerja pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat BPKPAD Kota Binjai selama periode 2016 sampai dengan tahun 2021 dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Tahun
2016-2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
BPKPAD	4.258.825.414	7.962.780.818	8.418.995.018	7.899.338.540	6.805.944.080	2.846.345.021	5.180.287.541	6.403.900.384	6.295.237.249	5.792.098.776	66,83%	65,06%	76,06%	79,69%	85,10%	636.779.666,50	736.438.438,75

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi BPKPAD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BPKPAD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indikator Kinerja Utama																		
1	Prosentase peningkatan pendapatan daerah				104,73%	96,03%	110,81%	103,44%	104,73%	104,73%	96,03%	110,81%	103,44%	102,88%	104,73%	96,03%	110,81%	103,44 %	102,88%
2	Prosentase realisasi PAD terhadap target PAD				104,73%	96,03%	110,81%	103,44%	104,73%	104,73%	96,03%	110,81%	103,44%	102,88%	104,73%	96,03%	110,81%	103,44 %	102,88%
3	Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah				104,73%	96,03%	110,81%	103,44%	104,73%	104,73%	96,03%	110,81%	103,44%	102,88%	104,73%	96,03%	110,81%	103,44 %	102,88%
4	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD yang ditetapkan				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Keberadaan laporan keuangan pemerintah daerah				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	jumlah barang milik daerah yang dapat diinventarisasi				630.554	922.78	1.331.095	1.548.383	1.453.781	630.554	922.78	1.331.095	1.548.383	1.453.781	630.554	922.78	#####	1.548.383	1.453.781

7	jumlah aset tanah Pemda yang dapat disertifikatkan				250	250	250	250	250	199	199	199	199	216	199	199	199	199	216
8	Persentase Aset Pemda yang dapat dioptimalkan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Rasio Pendapatan BUMD dan LKM dalam Penyertaan Modal BUMD dan LKM				16,72%	37,20%	13,27%	15,22%	52,90%	16,72%	37,20%	13,27%	15,22%	52,90%	16,72%	37,20%	13,27%	15,22%	52,90%
10	Rasio PNS yang menguasai operasional Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah				3/8	4/7	6/9	9/9	10/10	3/8	4/7	6/9	9/9	10/10	3/8	4/7	6/9	9/9	10/10

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKPAD Kota Binjai

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKPAD Kota Binjai dalam lima tahun terakhir menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas yang semakin meningkat. Hal ini selain menjadi nilai tambah tersendiri bagi BPKPAD namun jika tidak terkelola dengan baik akan menyebabkan semakin bertambahnya beban kerja SDM yang ada.

Tantangan yang masih dihadapi BPKPAD Kota Binjai dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sedangkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks;
2. Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dan kurang memahami etos kerja serta tanggung jawab terhadap tupoksi masing-masing;
3. Masih adanya pegawai yang kurang memahami peraturan perundang-undangan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sehingga masih ada anggapan dan pola pikir dulu bisa dan tidak apa-apa kenapa sekarang tidak bisa;
4. Koordinasi dan komunikasi antar staf, antar bidang dan antar Perangkat Daerah masih belum dapat dilakukan lebih intens;
5. Lokasi Aset Daerah yang sulit dijangkau dan diidentifikasi;
6. Belum Optimalnya pengakuan terhadap *reward and punishment*;
7. Belum maksimalnya dukungan jaringan online;
8. Belum optimalnya dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

Disamping tantangan diatas, masih terdapat peluang yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas BPKPAD Kota Binjai. Adapun beberapa **Peluang** dimaksud adalah sebagai berikut:

11. Luasnya kewenangan yang dimiliki;
12. Adanya aturan dan sosialisasi tentang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
13. Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang berbasis teknologi informasi;
14. Adanya petunjuk teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Tersedianya alokasi dana untuk peningkatan kapasita sumber daya aparatur;

16. Adanya pembagian tugas yang terstruktur dalam menyelesaikan tugas dalam penyusunan laporan keuangan;
17. Sumber daya aparatur yang memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
18. Tersedianya SOP dan Standar Mutu Pelayanan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Setelah dilakukan analisis secara seksama maka teridentifikasi permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dalam melakukan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. Permasalahan yang paling nampak dihadapi saat ini diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset cenderung berubah-ubah sehingga diperlukan waktu untuk penyesuaian mengikuti peraturan yang baru	Peraturan sering berubah-ubah Kemampuan memahami peraturan baru memerlukan pelatihan dan bimbingan	Kurangnya anggaran untuk mengikuti diklat dan bimbingan teknis tentang peraturan perundang-undangan
2	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang berubah dan belum optimal	Migrasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dari SIMDA ke SIPD	Aplikasi SIPD belum optimal
3	Produk hukum daerah tentang tarif retribusi belum diperbarui/direvisi	Tarif retribusi belum diperbarui/direvisi	SKPD kurang intens merevisi Perda Retribusi
4	Belum optimalnya penggalan potensi sumber pendapatan daerah	Sumber pendapatan daerah masih sedikit	Sumber pendapatan daerah belum tereksplorate maksimal
5	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Target Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tidak tercapai	Masyarakat kurang memahami manfaat PBB
6	Pencairan anggaran tidak sesuai dengan aliran kas sehingga terjadi penumpukan di triwulan IV	Penyerapan anggaran di triwulan I – III rendah	SKPD lambat memulai pelaksanaan kegiatannya
7	Terdapatnya aset tanah yang belum bersertifikat	Proses sertifikat aset tanah terkendala	Adanya aset tanah yang tidak memiliki legalitas pendukung

PERMASALAHAN UTAMA 1
Migrasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
dari SIMDA ke SIPD masih dalam tahap
penyempurnaan

TUJUAN 1. Meningkatkan Sistem akuntabilitas
melalui integrasi sistem perencanaan, sistem
penganggaran dan pelaporan kinerja
Indikator Kinerja
Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN 1 Meningkatnya kualitas tata kelola
pemerintahan
Indikator Kinerja:
Opini Laporan Keuangan

Permasalahan Pokok PD
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang
berubah dan belum optimal

Strategi 1
Peningkatan Aplikasi SIPD

Program 1 Program Pengelolaan
Keuangan Daerah

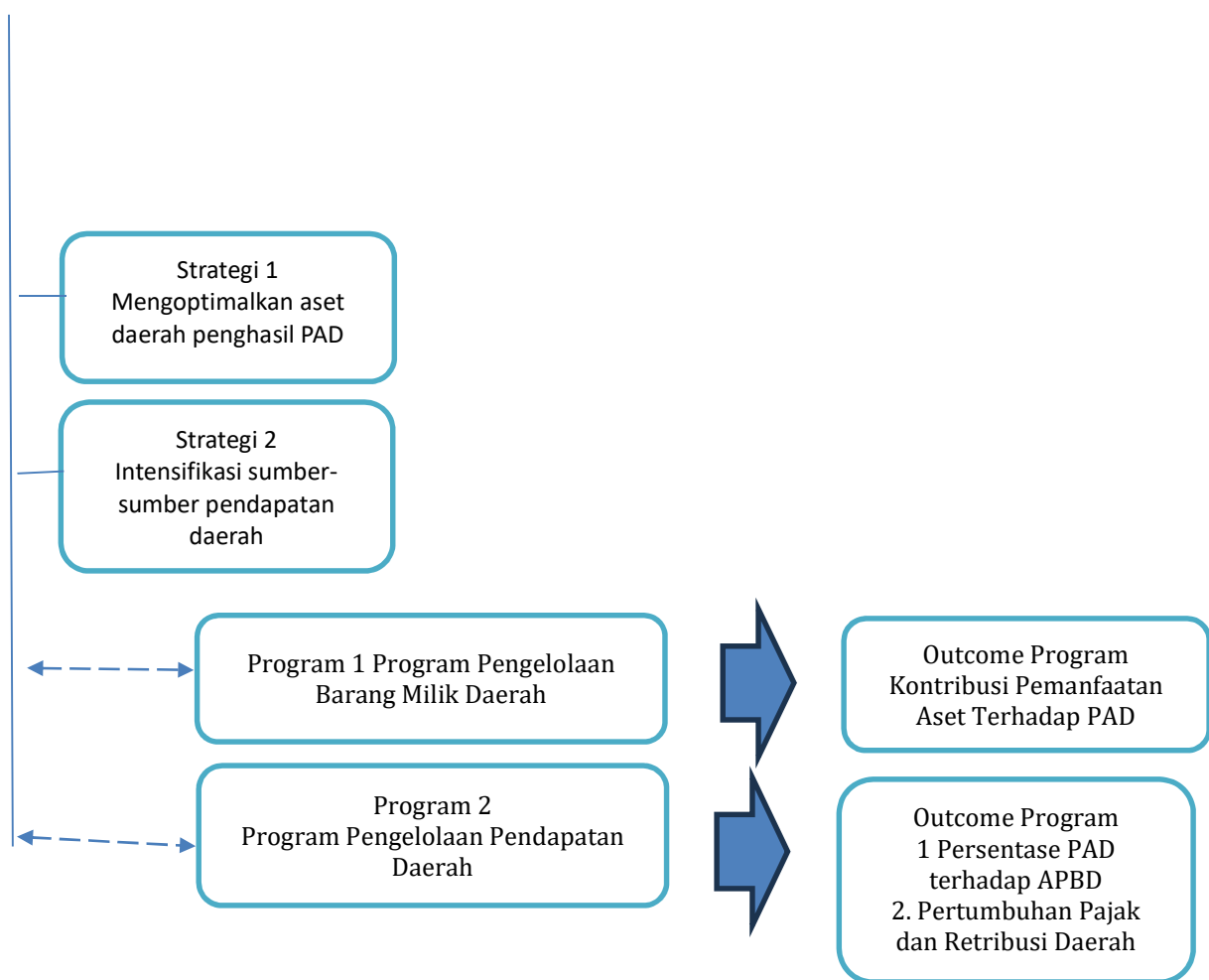


Outcome Program
1. Menurunnya persentase
SiLPA terhadap APBD.
2. Opini Laporan Keuangan

PERMASALAHAN UTAMA 2
Belum optimalnya penggalan potensi sumber pendapatan
daerah
dan Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak
Bumi dan Bangunan

TUJUAN 2
Optimalnya Pengelolaan Aset Daerah dan Penggalan Potensi
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Indikator Kinerja : Tingkat Kemandiran Keuangan Daerah

SASARAN 2
Meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah
Indikator Kinerja:
1. Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD
2. Persentase PAD terhadap APBD
3. Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai yang juga telah ditetapkan sebagai Visi Kota Binjai Tahun 2021-2026 yakni **“Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius”**. Dalam rangka pencapaian Visi tersebut telah ditetapkan

3 (tiga) Misi Pembangunan daerah yang satu sama lain saling menguatkan dan bersinergi, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional;
2. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.

Dari ketiga Misi diatas, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Misi yang relevan sebagai acuan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai menyusun rencana strategisnya yakni Misi Kesatu **“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional”**. Untuk dapat mencapai Visi dan Misi Kota Binjai Tahun 2021-2026 tersebut dilakukan identifikasi permasalahan pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Identifikasi Permasalahan BPKPAD Kota Binjai

Visi: “Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius”				
No	Misi	Permasalahan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional	Pemahaman tentang Peraturan baru masih kurang	Kurangnya Diklat dan Bimtek tentang peraturan baru	Meningkatkan Anggaran Diklat dan Bimtek
		Migrasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dari SIMDA ke SIPD	SIPD belum optimal	Penyempurnaan yang terus-menerus dilakukan admin SIPD Kemendagri
		Tarif retribusi belum diperbarui /direvisi	SKPD kurang intens merevisi Perda Retibusinya	Surat Edaran Kepala Daerah untuk merevisi Perda Retribusi
		Sumber pendapatan daerah masih sedikit	Sumber pendapatan daerah belum tereksplora maksimal	Penggalian potensi pendapatan daerah secara kontinyu
		Target Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang	Pemberian <i>reward</i> dan <i>punishman</i> kepada pembayar

		tidak tercapai	manfaat PBB	PBB
		Penyerapan anggaran di triwulan I – III rendah	SKPD tidak melaksanakan kegiatannya sejak awal tahun	Evaluasi berkala tentang progres penyerapan anggaran SKPD
		Terdapatnya aset tanah yang belum bersertifikat	Adanya aset tanah yang tidak memiliki legalitas pendukung	Koordinasi dengan BPN dalam proses sertifikat aset tanah

Selanjutkan disusun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjaidalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKPAD Kota Binjai

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius				
No	Misi	No	Tujuan	Sasaran
1	Misi 1 : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, melayani dan profesional	1	Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

		2	Meningkatkan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan pelaporan kinerja	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
		3	Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
		4	Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah
		5	Mengoptimalkan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Provinsi

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai sebagai Perangkat Daerah Kota Binjai, dalam melaksanakan tugasnya harus mendukung sasaran jangka menengah Kementerian/Lembaga dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia, maupun sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Provinsi dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Renstranya, Visi Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Tahun 2020-2024 adalah **Menjadi Pengelola Keuangan Negara yang Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan).

Sedangkan Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah: **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Transparan, Berbasis Teknologi Informasi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Makna strategisnya mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini.

Pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana dan/atau program bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan juga untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program “lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip *precautionary principles*, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternative penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

KLHS bermanfaat untuk memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antar pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui proses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam hal penentuan isu-isu strategis ini kita melihat kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai kedalam pola analisis SWOT.

Untuk mencapai hasil konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu strategi yang menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran yang konseptual, analitis dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Identifikasi dan analisa dilakukan dengan pendekatan SWOT yaitu berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal serta perpaduan diantara dua kondisi tersebut, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Faktor Internal

1. Kekuatan/potensi (Strength)

- 1) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 2) Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 3) Personil berasal dari unit yang membidangi urusan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
- 4) Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Kelemahan (Weaknes)

- 1) Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen, serta prasarana penunjang kerja berupa ruangan dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari dan pemberian layanan secara optimal kepada pihak yang berkepentingan.
 - 2) Terbatasnya alokasi anggaran guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 3) Belum optimalnya kualitas pelayanan public melalui sisitem online dan transparan.
- 4) Belum optimalnya kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
- 5) Belum optimalnya transparansi pengelolaan keuangan publik yang

berbasis pada e-government dan e-budgeting.

Faktor Eksternal

3. Kesempatan/Peluang (Opportunity)

- 1) Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
- 2) Adanya lembaga pemerintahan dan swasta yang mendukung upaya peningkatan kapasitas dan kinerja organisasi serta kompetensi personil.
- 3) Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik.
- 4) Adanya kesamaan tekad, pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh PD dalam rangka kepatuhan terhadap perundang-undangan di bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah.
- 5) Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.

Tabel 3.4.
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas belum memadai	11	20	17	12	8	20	88
2	Sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan pelaporan kinerja belum ditingkatkan	12	20	17	13	10	18	90
3	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	12	19	18	10	9	19	87
4	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah	13	18	18	11	8	18	86
5	Belum optimalnya penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	15	20	20	15	8	20	98

Berdasarkan Nilai Skala Kriteria, maka penentuan isu strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai ke depan adalah:

1. Belum optimalnya penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah
2. Sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, Sistem penganggaran dan pelaporan kinerja belum ditingkatkan
3. Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas belummemadai
4. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
5. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun berlandaskan tujuan dan sasaran pada RPJMD guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kota Binjai disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKPAD Kota Binjai

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Aparatur SipilNegara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan	Terlaksananya tata kelola pemerintaha n yang berkualitas	%	80	85	90	95	100
2	Meningkatkan Sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan pelaporankinerja	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan	Menurunnya persentase SILPA terhadap APBD	%	0,018	0,017	0,016	0,015	0,014
			Opini BPK	Peringkat Penilaian LK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

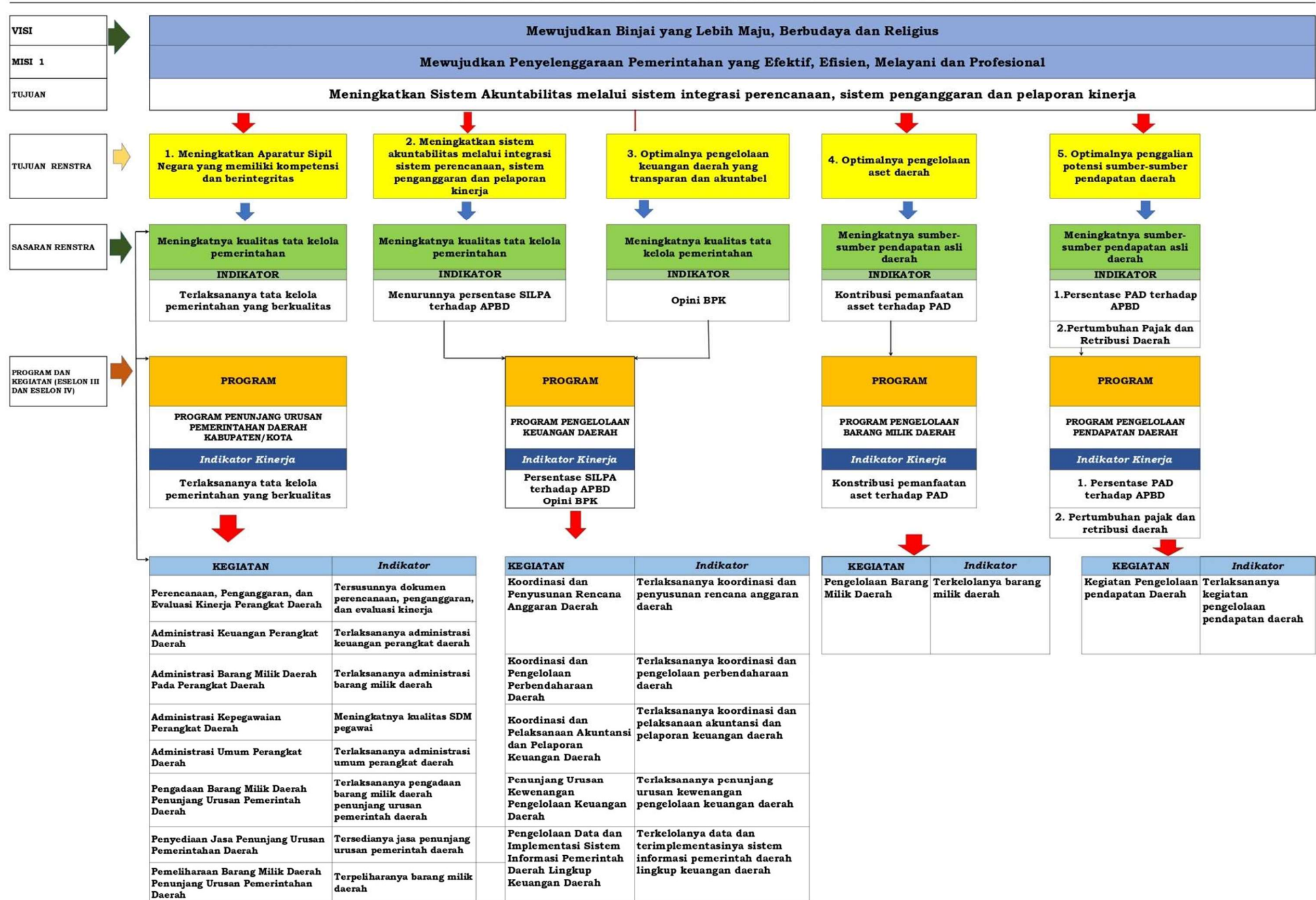
3	MeningkatnyaKemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya sumber- sumber pendapatan asli daerah	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	%	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50
			Persentase PAD terhadapAPBD	%	19,00	19,25	19,50	19,75	20,00
			Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah	%	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

Revisi Tabel 4.1.
Revisi atas Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKPAD Kota Binjai

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	Meningkatnya pengelolaan dan penatalayanan administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pelaporan kinerja tahunan	%				100	100
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	Peringkat Penilaian AKIP				A	A
2	Meningkatkan Sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan	Menurunnya persentase SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) terhadap APBD	%				0,015	0,014
			Opini BPK	Peringkat Penilaian				WTP	WTP

No	Tujuan dan pelaporankinerja	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
				Laporan Keuangan					
3	MeningkatnyaKemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	%				4,25	4,50
			Persentase PAD terhadapAPBD	%				19,75	20,00
			Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah	%				6,00	7,00

CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah/perangkat daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah/perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh arena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ketahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki focus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan
Kebijakan

VISI: Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius			
MISI 1: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	Meningkatnya pengelolaan dan penatalayanan administrasi dan manajemen perkantoran	Peningkatan SDM Aparatur Sipil Negara	Mengintensifkan Diklat dan Bimtek ASN
2. Meningkatkan Sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan pelaporan kinerja	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan Laporan keuangan Daerah	Mengintensifkan Diklat dan Bimtek SIPD
3. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan Laporan keuangan Daerah	Monitoring dan Evaluasi secara berkala
4. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah	Peningkatan kemandirian keuangan daerah	Mengoptimalkan aset daerah penghasil PAD
5. Mengoptimalkan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah	Peningkatan kemandirian keuangan daerah	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Revisi Tabel 5.1.
Revisi atas Tujuan, Sasaran, Strategi
dan Kebijakan

VISI: Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius			
MISI 1: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	Meningkatnya pengelolaan dan penatalayanan administrasi dan manajemen perkantoran	Peningkatan SDM Aparatur Sipil Negara	Mengintensifkan Diklat dan Bimtek ASN
2. Meningkatkan Sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan pelaporan kinerja	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan Laporan keuangan Daerah	Mengintensifkan Diklat dan Bimtek SIPD
3. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan Laporan keuangan Daerah	Monitoring dan Evaluasi secara berkala
4. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah	Peningkatan kemandirian keuangan daerah	Mengoptimalkan aset daerah penghasil PAD
5. Mengoptimalkan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah	Peningkatan kemandirian keuangan daerah	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai merupakan program prioritas yang tercantum pada Perubahan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kota Binjai. Program dan indikator kinerja (outcome) serta indikasi pagu anggaran selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kota Binjai sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kota Binjai maka program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026 adalah program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan tujuan, strategi dan kebijakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam RPJMD Kota Binjai. Selain itu, dilaksanakan pula program-program rutin lainnya sebagai penunjang pencapaian kinerja program prioritas. Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan
Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan
Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
				-		38.058.943.370	100	1.226.952.647,00	100	3.810.033.190,06	100	56.880.016.051,34	100	59.786.696.175,87	100	63.250.553.238,82	100	285.054.251.303,09		
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	%	100	18.610.134.070	100	21.710.988.897	100	22.749.163.946	100	24.190.085.307	100	25.378.649.054	100	27.030.121.935	100	121.159.009.139		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Dokumen	0	-	6	67.500.000	6	70.875.000	6	74.418.750	6	78.139.688	6	82.046.672	30	372.980.109		
	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan BPKPAD	Dokumen	0	-	1	15.000.000	1	15.750.000,00	1	16.537.500,00	1	17.364.375,00	1	18.232.593,75	5	82.884.468,75		

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terkoordinasi dan tersusunnya dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	-	1	10.000.000	1	10.500.000,00	1	11.025.000,00	1	11.576.250,00	1	12.155.062,50	5	55.256.312,50		
	5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terkoordinasi dan tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	-	1	12.500.000	1	13.125.000,00	1	13.781.250,00	1	14.470.312,50	1	15.193.828,13	5	69.070.390,63		
	5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terkoordinasi dan tersusunnya dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	-	1	10.000.000	1	10.500.000,00	1	11.025.000,00	1	11.576.250,00	1	12.155.062,50	5	55.256.312,50		
	5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terkoordinasi dan tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	-	1	10.000.000	1	10.500.000,00	1	11.025.000,00	1	11.576.250,00	1	12.155.062,50	5	55.256.312,50		
	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terkoordinasi dan tersusunnya dokumen laporan kinerja dan realisasi SKPD	Dokumen	0	-	1	10.000.000	1	10.500.000,00	1	11.025.000,00	1	11.576.250,00	1	12.155.062,50	5	55.256.312,50		

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Tahun	1	16.526.438.998	1	18.204.300.818	1	19.117.265.859	1	20.076.154.152	1	21.083.289.359	1	22.141.114.077	5	100.622.124.264	
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tahun	1	16.224.259.798	1	17.846.685.777,80	1	18.739.020.066,69	1	19.675.971.070,02	1	20.659.769.623,53	1	21.692.758.104,70	5	98.614.204.642,74	
	5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terkoordinasi dan terlaksananya akuntansi SKPD	Tahun	1	252.179.200	1	302.615.040,00	1	317.745.792,00	1	333.633.081,60	1	350.314.735,68	1	367.830.472,46	5	1.672.139.121,74	
	5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terkoordinasi dan tersusunnya laporan keuangan SKPD	Dokumen	1	50.000.000	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	73.205.000,00	1	80.525.500,00	5	335.780.500,00	
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	Dokumen	0	-	2	20.000.000	2	21.000.000	2	22.050.000	2	23.152.500	2	24.310.125	10	110.512.625	

T u j u a n / S a s a r a n	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	S a t u a n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya laporan barang milik daerah SKPD	Dok ume n	0	-	1	10.000.000,00	1	10.500.000,00	1	11.025.000,00	1	11.576.250,00	1	12.155.062,50	1	55.256.312,50		
	5.02.01.2.03.06	Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya dokumen penatausaha an barang milikdaerah SKPD	Dok ume n	0	-	1	10.000.000,00	1	10.500.000,00	100	11.025.000,00	100	11.576.250,00	100	12.155.062,50	100	55.256.312,50		
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatn ya kualitas SDM pegawai	%	0	-	15	365.000.000	30	220.000.000	45	407.000.000	60	266.200.000	75	457.820.000	75	1.716.020.000		
	5.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatny a sarana dan prasarana disiplin pegawai	Kegi atan	0	-	1	15.000.000	0	-	1	15.000.000	0	-	1	15.000.000	3	45.000.000,00		
	5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Terlaksanan ya pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	Kegi atan	0	-	1	150.000.000	0	-	1	150.000.000	0	-	1	150.000.000	3	450.000.000,00		

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	Orang	0	-	15	100.000.000,00	15	110.000.000,00	15	121.000.000,00	15	133.100.000,00	15	146.410.000,00	75	610.510.000,00
	5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai/opd yang mengikuti bimbingan teknis	Orang	0	-	15	100.000.000,00	15	110.000.000,00	15	121.000.000,00	15	133.100.000,00	15	146.410.000,00	75	610.510.000,00
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Tahun	1	905.682.200	1	1.079.929.020	1	1.187.921.922	1	1.306.714.114	1	1.437.385.526	1	1.581.124.078	5	6.593.074.660
	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tahun	1	19.998.500	1	21.998.350,00	1	24.198.185,00	1	26.618.003,50	1	29.279.803,85	1	32.207.784,24	5	134.302.126,59

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Kegiatan	1	72.549.300	1	79.804.230,00	1	87.784.653,00	1	96.563.118,30	1	106.219.430,13	1	116.841.373,14	5	487.212.804,57	
	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan bahan logistik kantor	Tahun	1	199.989.800	1	219.988.780,00	1	241.987.658,00	1	266.186.423,80	1	292.805.066,18	1	322.085.572,80	5	1.343.053.500,78	
	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Tahun	1	120.000.000	1	132.000.000,00	1	145.200.000,00	1	159.720.000,00	1	175.692.000,00	1	193.261.200,00	5	805.873.200,00	
	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tahun	1	39.765.200	1	43.741.720,00	1	48.115.892,00	1	52.927.481,20	1	58.220.229,32	1	64.042.252,25	5	267.047.574,77	
	5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu	Tahun	1	34.986.400	1	38.485.040,00	1	42.333.544,00	1	46.566.898,40	1	51.223.588,24	1	56.345.947,06	5	234.955.017,70	

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tahun	1	418.393.000	1	543.910.900,00	1	598.301.990,00	1	658.132.189,00	1	723.945.407,90	1	796.339.948,69	5	3.320.630.435,59
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan	0	-	4	500.000.000	3	525.000.000	4	551.250.000	3	578.812.500	4	657.753.125	18	2.912.815.625
	5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kegiatan	0	-	1	250.000.000,00	1	262.500.000,00	1	275.625.000,00	1	289.406.250,00	1	303.876.562,50	5	1.381.407.812,50
	5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kegiatan	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00
	5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Kegiatan	0	-	1	50.000.000,00	1	52.500.000,00	1	55.125.000,00	1	57.881.250,00	1	60.775.312,50	5	276.281.562,50

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Kegiatan	0	-	1	50.000.000,00	0	-	1	50.000.000,00	0	-	1	50.000.000,00	3	150.000.000,00
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tahun	1	742.005.872	1	964.280.159	1	1.046.124.375	1	1.135.423.823	1	1.232.887.565	1	1.339.293.750	5	5.718.009.673
	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat	Tahun	1	145.838.000	1	291.676.000,00	1	306.259.800,00	1	321.572.790,00	1	337.651.429,50	1	354.534.000,98	5	1.611.694.020,48
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tahun	1	427.972.872	1	470.770.159,20	1	517.847.175,12	1	569.631.892,63	1	626.595.081,90	1	689.254.590,08	5	2.874.098.898,93
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tahun	1	427.972.872	1	470.770.159,20	1	517.847.175,12	1	569.631.892,63	1	626.595.081,90	1	689.254.590,08	5	2.874.098.898,93

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	Tahun	1	168.195.000	12	201.834.000,00	1	222.017.400,00	1	244.219.140,00	1	268.641.054,00	1	295.505.159,40	5	1.232.216.753,40		
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	Tahun	1	436.007.000	1	509.978.900	1	560.976.790	1	617.074.469	1	678.781.916	1	746.660.107	5	3.113.472.182		
	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tahun	1	306.700.000	1	337.370.000,00	1	371.107.000,00	1	408.217.700,00	1	449.039.470,00	1	493.943.417,00	5	2.059.677.587,00		
	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharaan ya peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	29.940.000	1	50.898.000,00	1	55.987.800,00	1	61.586.580,00	1	67.745.238,00	1	74.519.761,80	5	310.737.379,80		

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharaan ya/ terehabilitasi nya gedung kantor dan bangunan lainnya	Tahun	1	49.957.000	1	59.948.400,00	1	65.943.240,00	1	72.537.564,00	1	79.791.320,40	1	87.770.452,44	5	365.990.976,84
	5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpeliharanya / terehabilitasi nya sarana dan prasarana pendukung gedung kator lainnya	Tahun	1	49.410.000	1	61.762.500,00	1	67.938.750,00	1	74.732.625,00	1	82.205.887,50	1	90.426.476,25	5	377.066.238,75
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SiLPA terhadap APBD	%	0,0196	16.310.896.700	0,0180	22.370.796.100	0,0170	23.512.303.802	0,0160	24.713.183.678	0,0150	25.976.634.016	0,0140	27.306.035.987	0,0140	123.878.953.583
			Opini BPK	Peringkat Penilaian Laporan Keuangan	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Tahun	1	710.921.600	1	2.496.467.680	1	2.621.291.064	1	2.752.355.617	1	2.889.973.398	1	3.034.472.068	5	13.794.559.827		
	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terkoordinasi dan tersusunnya KUA dan PPAS	Dokumen	1	86.999.900	1	91.349.895,00	1	95.917.389,75	1	100.713.259,24	1	105.748.922,20	1	111.036.368,31	5	504.765.834,50		
	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terkoordinasi dan tersusunnya perubahan KUA dan perubahan PPAS	Dokumen	1	86.999.900	1	91.349.895,00	1	95.917.389,75	1	100.713.259,24	1	105.748.922,20	1	111.036.368,31	5	504.765.834,50		
	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terkoordinasi, tersusun dan terverifikasinya RKA-SKPD	Dokumen	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00		
	5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terkoordinasi, tersusun dan terverifikasinya perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00		

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terkoordinasi, tersusun dan terverifikasinya DPA-SKPD	Dokumen	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00	
	5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terkoordinasi, tersusun dan terverifikasinya perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	-	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,50	5	828.844.687,50	
	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terkoordinasi dan tersusunnya Perda APBD dan Perkada penjabaran APBD	Peraturan	2	149.599.800	2	157.079.790,00	2	164.933.779,50	2	173.180.468,48	2	181.839.491,90	2	190.931.466,49	10	867.964.996,37	

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terkoordinasi dan tersusunnya Perda Perubahan APBD dan Perkada penjabaran Perubahan APBD	Peraturan	2	387.322.000		2	406.688.100,00	2	427.022.505,00	2	448.373.630,25	2	470.792.311,76	2	494.331.927,35	10	2.247.208.474,36
	5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terkoordinasi dan tersusunnya regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Tahun	0	-		1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00
	5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terkoordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Tahun	0	-		1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00
	5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terkoordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Tahun	0	-		1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terkoordinasinya perencanaan anggaran pembiayaan	Tahun	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00
	5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terbinanya perencanaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota	Kegiatan	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Tahun	1	149.998.300	1	1.594.997.790	1	1.674.747.680	1	1.758.485.063	1	1.846.409.317	1	1.938.729.782	5	8.813.369.632
	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terkoordinasi dan terkelolanya kas daerah	Tahun	1	149.998.300	1	194.997.790,00	1	204.747.679,50	1	214.985.063,48	1	225.734.316,65	1	237.021.032,48	5	1.077.485.882,10

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tersiapkan, terlaksananya pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Tahun	0	-	1	250.000.000,00	1	262.500.000,00	1	275.625.000,00	1	289.406.250,00	1	303.876.562,50	5	1.381.407.812,50		
	5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya penatausahaan pembiayaan daerah	Tahun	0	-	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,50	5	828.844.687,50		
	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Tahun	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00		

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya koordinasi,p elaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Tahun	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00	
	5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/P emotongan dan Penyetoran Perhitungan FihakKetiga (PFK)	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan danpengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan / pemotiongan dan penyetoran	Tahun	0	-	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,50	5	828.844.687,50	

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			PFK																
	5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Tahun	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00	

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaa n dan Pertanggungja waban Sub Kegiatan	Tersusunnya petunjuk teknis administrasi keuangan	Dokumen	0	-	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.250.000,00	1	115.762.500,00	1	121.550.625,00	5	552.563.125,00	
	5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaa n Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terbinanya penatausaha an keuangan pemerintah kabupaten/kota	Tahun	0	-	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,50	5	828.844.687,50	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan	%	100	399.996.300	100	2.359.357.930	100	2.495.293.723	100	2.639.823.095	100	2.793.555.405	100	2.957.148.445	100	13.245.178.598	

T u j u a n / S a s a r a n	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	S a t u a n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			daerah																	
	5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terkoordinas inya pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Kegi atan	0	-	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	1	330.750.000,00	1	347.287.500,00	1	364.651.875,00	5	1.657.689.375,00		
	5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksanan ya rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	Kegi atan	0	-	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	1	330.750.000,00	1	347.287.500,00	1	364.651.875,00	5	1.657.689.375,00		

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.02. 2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kegiatan	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00
	5.02.02. 2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terkonsolidasinya laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan pemerintah daerah	Kegiatan	1	199.996.300	1	219.995.930,00	1	241.995.523,00	1	266.195.075,30	1	292.814.582,83	1	322.096.041,11	5	1.343.097.152,24

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terkoordinasi dan tersusunnya rancangan Perda pertanggungjawaban APBD dan rancangan Perkada penjabaran pertanggungjawaban APBD	Peraturan	0	-	2	300.000.000,00	2	315.000.000,00	2	330.750.000,00	2	347.287.500,00	2	364.651.875,00	10	1.657.689.375,00
	5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK	Dokumen	0	-	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	1	330.750.000,00	1	347.287.500,00	1	364.651.875,00	1	1.657.689.375,00

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Dokumen	0	-	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	1	330.750.000,00	1	347.287.500,00	1	364.651.875,00	1	1.657.689.375,00
	5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan	Kegiatan	0	-	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	1	330.750.000,00	1	347.287.500,00	1	364.651.875,00	1	1.657.689.375,00
	5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terbinanya akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	Kegiatan	1	200.000.000	1	139.362.000,00	1	153.298.200,00	1	168.628.020,00	1	185.490.822,00	1	204.039.904,20	1	850.818.946,20

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	%	100	15.000.000.000	100	15.850.000.000	100	16.647.500.000	100	17.485.375.000	100	18.365.693.750	100	19.290.633.438	100	87.639.202.188		
	5.02.02.2.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Tersusunnya kebijakan dan alokasi subsidi	Kegiatan	0	-	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	73.205.000,00	1	305.255.000,00		
	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya dana darurat dan mendesak	Kegiatan	1	15.000.000.000	1	15.750.000.000,00	1	16.537.500.000,00	1	17.364.375.000,00	1	18.232.593.750,00	1	19.144.223.437,50	1	87.028.692.187,50		
	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terkelolanya dana bagi hasil kabupaten/kota	Kegiatan	0	-	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	73.205.000,00	1	305.255.000,00		
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terkelolanya data dan terimplementasinya sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	%	100	49.980.500	100	69.972.700	100	73.471.335	100	77.144.902	100	81.002.147	100	85.052.254	100	386.643.338		

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya implementasi dan pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah	Tahun	1	49.980.500	1	69.972.700,00	1	73.471.335,00	1	77.144.901,75	1	81.002.146,84	1	85.052.254,18	1	386.643.337,77	
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	%	3,30	640.000.000	3,50	1.320.000.000	3,75	1.386.000.000	4,00	1.455.300.000	4,25	1.528.065.000	4,50	1.604.468.250	4,50	7.293.833.250	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terkelolanya barang milik daerah	%	100	640.000.000	100	1.320.000.000	100	1.386.000.000	100	1.455.300.000	100	1.528.065.000	100	1.604.468.250	100	7.293.833.250	
	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya standar harga	Buku	1	400.000.000	1	420.000.000,00	1	441.000.000,00	1	463.050.000,00	1	486.202.500,00	1	510.512.625,00	5	2.320.765.125,00	
	5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah	Kegiatan	1	50.000.000	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,50	5	828.844.687,50	
	5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya penilaian barang milik daerah	Kegiatan	1	40.000.000	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,50	5	828.844.687,50	

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	Tahun	0	-	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.250.000,00	1	115.762.500,00	1	121.550.625,00	5	552.563.125,00	
	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Tahun	1	50.000.000	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,50	5	828.844.687,50	
	5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Kegiatan	0	-	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.250.000,00	1	115.762.500,00	1	121.550.625,00	1	552.563.125,00	
	5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik	Tersusunnya laporan barang milik	Dokumen	0	-	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.250.000,00	1	115.762.500,00	1	121.550.625,00	1	552.563.125,00	

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Daerah	daerah															
	5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terbinanya pengelolaan barang milik daerah	Kegiatan	1	100.000.000	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,50	1	828.844.687,50
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap APBD	%	12,90	2.497.912.600	19,00	5.825.167.650	19,25	6.162.565.443	19,50	6.521.447.066	19,75	6.903.348.106	20,00	7.309.927.066	20,00	32.722.455.331
			Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	%	2,00		3,00		4,00		5,00		6,00		7,00		7,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Kegiatan	7	2.497.912.600	14	5.825.167.650	14	6.162.565.443	14	6.521.447.066	14	6.903.348.106	14	7.309.927.066	70	32.722.455.331
	5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kegiatan	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Kegiatan	1	299.999.900	1	464.999.845,00	1	488.249.837,25	1	512.662.329,11	1	538.295.445,57	1	565.210.217,85	5	2.569.417.674,78	
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Kegiatan	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00	5	610.510.000,00	
	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Kegiatan	1	599.959.700	1	899.939.550,00	1	944.936.527,50	1	992.183.353,88	1	1.041.792.521,57	1	1.093.882.147,65	5	4.972.734.100,59	
	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Kegiatan	1	149.999.800	1	164.999.780,00	1	181.499.758,00	1	199.649.733,80	1	219.614.707,18	1	241.576.177,90	5	1.007.340.156,88	

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Kegiatan	1	73.010.000	1	80.311.000,00	1	88.342.100,00	1	97.176.310,00	1	106.893.941,00	1	117.583.335,10	5	490.306.686,10
	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksananya penilaian PBBP2 serta BPHTB	Kegiatan	1	299.996.500	1	1.049.987.750,00	1	1.102.487.137,50	1	1.157.611.494,38	1	1.215.492.069,09	1	1.276.266.672,55	5	5.801.845.123,52
	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya penetapan wajib pajak daerah	Kegiatan	0	-	1	250.000.000,00	1	262.500.000,00	1	275.625.000,00	1	289.406.250,00	1	303.876.562,50	5	1.381.407.812,50
	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Kegiatan	0	-	1	250.000.000,00	1	262.500.000,00	1	275.625.000,00	1	289.406.250,00	1	303.876.562,50	5	1.381.407.812,50

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Kegiatan	0	-	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	1	330.750.000,00	1	347.287.500,00	1	364.651.875,00	5	1.657.689.375,00
	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah	Kegiatan	0	-	1	400.000.000,00	1	420.000.000,00	1	441.000.000,00	1	463.050.000,00	1	486.202.500,00	5	2.210.252.500,00
	5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya penyelesaian keberatan pajak daerah	Kegiatan	0	-	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	1	330.750.000,00	1	347.287.500,00	1	364.651.875,00	5	1.657.689.375,00
	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Kegiatan	1	524.968.200	1	787.452.300,00	1	826.824.915,00	1	868.166.160,75	1	911.574.468,79	1	957.153.192,23	5	4.351.171.036,76

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Kegiatan	1	549.978.500	1	577.477.425,00	1	635.225.167,50	1	698.747.684,25	1	768.622.452,68	1	845.484.697,94	5	3.525.557.427,37	

Revisi Tabel 6.1
Revisi atas Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan
Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan
Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				-		38.058.94 3.370	100	1.226.952.6 47,00	100	3.810.033 .190,06	100	56.880.016. 051,34	100	59.786.696. 175,87	100	63.250.553. 238,82	100	285.054.251. 303,09
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persenta se pelapora n kinerja tahunan	%		18.610.13 4.070		21.710.988. 897		22.749.16 3.946		24.190.085. 307	100	25.378.649. 054	100	27.030.121. 935	100	121.159.009. 139
			Nilai AKIP Perangka t Daerah	Peringk at Penilai an AKIP								A	A	A				

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Dokumen	0	-	6	67.500.000	6	70.875.000	6	74.418.750	6	78.139.688	6	82.046.672	30	372.980.109
	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan BPKPAD	Dokumen	0	-	1	15.000.000	1	15.750.000,00	1	16.537.500,00	1	17.364.375,00	1	18.232.593,75	5	82.884.468,75
	5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terkoordinasi dan tersusunnya dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	-	1	10.000.000	1	10.500.000,00	1	11.025.000,00	1	11.576.250,00	1	12.155.062,50	5	55.256.312,50
	5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terkoordinasi dan tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	-	1	12.500.000	1	13.125.000,00	1	13.781.250,00	1	14.470.312,50	1	15.193.828,13	5	69.070.390,63
	5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terkoordinasi dan tersusunnya dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	-	1	10.000.000	1	10.500.000,00	1	11.025.000,00	1	11.576.250,00	1	12.155.062,50	5	55.256.312,50

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terkoordinasi dan tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	-	1	10.000.000	1	10.500.000,00	1	11.025.000,00	1	11.576.250,00	1	12.155.062,50	5	55.256.312,50	
	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terkoordinasi dan tersusunnya dokumen laporan kinerja dan realisasi SKPD	Dokumen	0	-	1	10.000.000	1	10.500.000,00	1	11.025.000,00	1	11.576.250,00	1	12.155.062,50	5	55.256.312,50	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Tahun	1	16.526.438.998	1	18.204.300.818	1	19.117.265.859	1	20.076.154.152	1	21.083.289.359	1	22.141.114.077	5	100.622.124.264	
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tahun	1	16.224.259.798	1	17.846.685.777,80	1	18.739.020.066,69	1	19.675.971.070,02	1	20.659.769.623,53	1	21.692.758.104,70	5	98.614.204.642,74	
	5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terkoordinasi dan terlaksananya akuntansi SKPD	Tahun	1	252.179.200	1	302.615.040,00	1	317.745.792,00	1	333.633.081,60	1	350.314.735,68	1	367.830.472,46	5	1.672.139.121,74	

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terkoordinasi dan tersusunnya laporan keuangan SKPD	Dokumen	1	50.000.000	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	73.205.000,00	1	80.525.500,00	5	335.780.500,00	
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	Dokumen	0	-	2	20.000.000	2	21.000.000	2	22.050.000	2	23.152.500	2	24.310.125	10	110.512.625	
	5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya laporan barang milik daerah SKPD	Dokumen	0	-	1	10.000.000,00	1	10.500.000,00	1	11.025.000,00	1	11.576.250,00	1	12.155.062,50	1	55.256.312,50	
	5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya dokumen penatausahaan barang milik daerah SKPD	Dokumen	0	-	1	10.000.000,00	1	10.500.000,00	100	11.025.000,00	100	11.576.250,00	100	12.155.062,50	100	55.256.312,50	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas SDM pegawai	%	0	-	15	365.000.000	30	220.000.000	45	407.000.000	60	266.200.000	75	457.820.000	75	1.716.020.000	

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya sarana dan prasarana disiplin pegawai	Kegiatan	0	-	1	15.000.000	0	-	1	15.000.000	0	-	1	15.000.000	3	45.000.000,00
	5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	Kegiatan	0	-	1	150.000.000	0	-	1	150.000.000	0	-	1	150.000.000	3	450.000.000,00
	5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	Orang	0	-	15	100.000.000,00	15	110.000.000,00	15	121.000.000,00	15	133.100.000,00	15	146.410.000,00	75	610.510.000,00
	5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai/opd yang mengikuti bimbingan teknis	Orang	0	-	15	100.000.000,00	15	110.000.000,00	15	121.000.000,00	15	133.100.000,00	15	146.410.000,00	75	610.510.000,00
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Tahun	1	905.682.200	1	1.079.929.020	1	1.187.921.922	1	1.306.714.114	1	1.437.385.526	1	1.581.124.078	5	6.593.074.660

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tahun	1	19.998.500	1	21.998.350,00	1	24.198.185,00	1	26.618.003,50	1	29.279.803,85	1	32.207.784,24	5	134.302.126,59
	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Kegiatan	1	72.549.300	1	79.804.230,00	1	87.784.653,00	1	96.563.118,30	1	106.219.430,13	1	116.841.373,14	5	487.212.804,57
	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan bahan logistik kantor	Tahun	1	199.989.800	1	219.988.780,00	1	241.987.658,00	1	266.186.423,80	1	292.805.066,18	1	322.085.572,80	5	1.343.053.500,78
	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Tahun	1	120.000.000	1	132.000.000,00	1	145.200.000,00	1	159.720.000,00	1	175.692.000,00	1	193.261.200,00	5	805.873.200,00

T u j u a n / S a s a r a n	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	S a t u a n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tahun	1	39.765.200	1	43.741.720,00	1	48.115.892,00	1	52.927.481,20	1	58.220.229,32	1	64.042.252,25	5	267.047.574,77		
	5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu	Tahun	1	34.986.400	1	38.485.040,00	1	42.333.544,00	1	46.566.898,40	1	51.223.588,24	1	56.345.947,06	5	234.955.017,70		
	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tahun	1	418.393.000	1	543.910.900,00	1	598.301.990,00	1	658.132.189,00	1	723.945.407,90	1	796.339.948,69	5	3.320.630.435,59		
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan	0	-	4	500.000.000	3	525.000.000	4	551.250.000	3	578.812.500	4	657.753.125	18	2.912.815.625		

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kegiatan	0	-	1	250.000.000,00	1	262.500.000,00	1	275.625.000,00	1	289.406.250,00	1	303.876.562,50	5	1.381.407.812,50
	5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kegiatan	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00
	5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Kegiatan	0	-	1	50.000.000,00	1	52.500.000,00	1	55.125.000,00	1	57.881.250,00	1	60.775.312,50	5	276.281.562,50
	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Kegiatan	0	-	1	50.000.000,00	0	-	1	50.000.000,00	0	-	1	50.000.000,00	3	150.000.000,00
	5.02.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tahun	1	742.005.872	1	964.280.159	1	1.046.124.375	1	1.135.423.823	1	1.232.887.565	1	1.339.293.750	5	5.718.009.673

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat	Tahun	1	145.838.000	1	291.676.000,00	1	306.259.800,00	1	321.572.790,00	1	337.651.429,50	1	354.534.000,98	5	1.611.694.020,48
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tahun	1	427.972.872	1	470.770.159,20	1	517.847.175,12	1	569.631.892,63	1	626.595.081,90	1	689.254.590,08	5	2.874.098.898,93
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tahun	1	427.972.872	1	470.770.159,20	1	517.847.175,12	1	569.631.892,63	1	626.595.081,90	1	689.254.590,08	5	2.874.098.898,93
	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	Tahun	1	168.195.000	12	201.834.000,00	1	222.017.400,00	1	244.219.140,00	1	268.641.054,00	1	295.505.159,40	5	1.232.216.753,40
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpelihara nya barang milik daerah	Tahun	1	436.007.000	1	509.978.900	1	560.976.790	1	617.074.469	1	678.781.916	1	746.660.107	5	3.113.472.182

T u j u a n / S a s a r a n	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	S a t u a n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kebutuhan jasa pemeliharaaa n, biaya pemeliharaaa n, Pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tahun	1	306.700.000	1	337.370.000,00	1	371.107.000,00	1	408.217.700,00	1	449.039.470,00	1	493.943.417,00	5	2.059.677.587,00		
	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharaan ya peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	29.940.000	1	50.898.000,00	1	55.987.800,00	1	61.586.580,00	1	67.745.238,00	1	74.519.761,80	5	310.737.379,80		
	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharaan ya/ terehabilitasi nya gedung kantor dan bangunan lainnya	Tahun	1	49.957.000	1	59.948.400,00	1	65.943.240,00	1	72.537.564,00	1	79.791.320,40	1	87.770.452,44	5	365.990.976,84		

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kator lainnya	Tahun	1	49.410.000	1	61.762.500,00	1	67.938.750,00	1	74.732.625,00	1	82.205.887,50	1	90.426.476,25	5	377.066.238,75
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA terhadap APBD	%	0,0196	16.310.896.700	0,0180	22.370.796.100	0,0170	23.512.303.802	0,0160	24.713.183.678	0,0150	25.976.634.016	0,0140	27.306.035.987	0,0140	123.878.953.583
			Opini BPK	Peringkat Penilaian Laporan Keuangan	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran	Tahun	1	710.921.600	1	2.496.467.680	1	2.621.291.064	1	2.752.355.617	1	2.889.973.398	1	3.034.472.068	5	13.794.559.827

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			daerah															
	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terkoordinasi dan tersusunnya KUA dan PPAS	Dokumen	1	86.999.900	1	91.349.895,00	1	95.917.389,75	1	100.713.259,24	1	105.748.922,20	1	111.036.368,31	5	504.765.834,50
	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terkoordinasi dan tersusunnya perubahan KUA dan perubahan PPAS	Dokumen	1	86.999.900	1	91.349.895,00	1	95.917.389,75	1	100.713.259,24	1	105.748.922,20	1	111.036.368,31	5	504.765.834,50
	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terkoordinasi, tersusun dan terverifikasinya RKA-SKPD	Dokumen	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00
	5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terkoordinasi, tersusun dan terverifikasinya perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terkoordinasi, tersusun dan terverifikasinya DPA-SKPD	Dokumen	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00
	5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terkoordinasi, tersusun dan terverifikasinya perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	-	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,50	5	828.844.687,50
	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terkoordinasi dan tersusunnya Perda APBD dan Perkada penjabaran APBD	Peraturan	2	149.599.800	2	157.079.790,00	2	164.933.779,50	2	173.180.468,48	2	181.839.491,90	2	190.931.466,49	10	867.964.996,37

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terkoordinasi dan tersusunnya Perda Perubahan APBD dan Perkada penjabaran Perubahan APBD	Peraturan	2	387.322.000	2	406.688.100,00	2	427.022.505,00	2	448.373.630,25	2	470.792.311,76	2	494.331.927,35	10	2.247.208.474,36
	5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terkoordinasi dan tersusunnya regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Tahun	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00
	5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terkoordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Tahun	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00
	5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terkoordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Tahun	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terkoordinasinya perencanaan anggaran pembiayaan	Tahun	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00	
	5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terbinanya perencanaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota	Kegiatan	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Tahun	1	149.998.300	1	1.594.997.790	1	1.674.747.680	1	1.758.485.063	1	1.846.409.317	1	1.938.729.782	5	8.813.369.632	
	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terkoordinasi dan terkelolanya kas daerah	Tahun	1	149.998.300	1	194.997.790,00	1	204.747.679,50	1	214.985.063,48	1	225.734.316,65	1	237.021.032,48	5	1.077.485.882,10	

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tersiapkan, terlaksananya pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Tahun	0	-	1	250.000.000,00	1	262.500.000,00	1	275.625.000,00	1	289.406.250,00	1	303.876.562,50	5	1.381.407.812,50	
	5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya penatausahaan pembiayaan daerah	Tahun	0	-	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,50	5	828.844.687,50	
	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Tahun	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00	

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026							
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Tahun	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00
	5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan / pemotongan dan penyetoran	Tahun	0	-	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,50	5	828.844.687,50

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			PFK															
	5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Tahun	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaa n dan Pertanggungja waban Sub Kegiatan	Tersusunnya petunjuk teknis administrasi keuangan	Dokumen	0	-	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.250.000,00	1	115.762.500,00	1	121.550.625,00	5	552.563.125,00	
	5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaa n Keuangan Pemerintah Kabupaten/Ko ta	Terbinanya penatausaha an keuangan pemerintah kabupaten/k ota	Tahun	0	-	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,50	5	828.844.687,50	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksanan ya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan	%	100	399.996.300	100	2.359.357.930	100	2.495.293.723	100	2.639.823.095	100	2.793.555.405	100	2.957.148.445	100	13.245.178.598	

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							2021		2022		2023		2024		2025				2026	
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp			T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			daerah																	
	5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terkoordinas inya pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Kegiatan	0	-	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	1	330.750.000,00	1	347.287.500,00	1	364.651.875,00	5	1.657.689.375,00		
	5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksanan ya rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	Kegiatan	0	-	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	1	330.750.000,00	1	347.287.500,00	1	364.651.875,00	5	1.657.689.375,00		

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
	5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kegiatan	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00	
	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terkonsolidasinya laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan pemerintah daerah	Kegiatan	1	199.996.300	1	219.995.930,00	1	241.995.523,00	1	266.195.075,30	1	292.814.582,83	1	322.096.041,11	5	1.343.097.152,24	

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terkoordinasi dan tersusunnya rancangan Perda pertanggungjawaban APBD dan rancangan penjabaran pertanggungjawaban APBD	Peraturan	0	-	2	300.000.000,00	2	315.000.000,00	2	330.750.000,00	2	347.287.500,00	2	364.651.875,00	10	1.657.689.375,00
	5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK	Dokumen	0	-	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	1	330.750.000,00	1	347.287.500,00	1	364.651.875,00	1	1.657.689.375,00

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Dokumen	0	-	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	1	330.750.000,00	1	347.287.500,00	1	364.651.875,00	1	1.657.689.375,00	
	5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan	Kegiatan	0	-	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	1	330.750.000,00	1	347.287.500,00	1	364.651.875,00	1	1.657.689.375,00	
	5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terbinanya akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	Kegiatan	1	200.000.000	1	139.362.000,00	1	153.298.200,00	1	168.628.020,00	1	185.490.822,00	1	204.039.904,20	1	850.818.946,20	

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	%	100	15.000.000.000	100	15.850.000.000	100	16.647.500.000	100	17.485.375.000	100	18.365.693.750	100	19.290.633.438	100	87.639.202.188	
	5.02.02.2.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Tersusunnya kebijakan dan alokasi subsidi	Kegiatan	0	-	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	73.205.000,00	1	305.255.000,00	
	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya dana darurat dan mendesak	Kegiatan	1	15.000.000.000	1	15.750.000.000,00	1	16.537.500.000,00	1	17.364.375.000,00	1	18.232.593.750,00	1	19.144.223.437,50	1	87.028.692.187,50	
	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terkelolanya dana bagi hasil kabupaten/kota	Kegiatan	0	-	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	73.205.000,00	1	305.255.000,00	
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terkelolanya data dan terimplementasinya sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	%	100	49.980.500	100	69.972.700	100	73.471.335	100	77.144.902	100	81.002.147	100	85.052.254	100	386.643.338	

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya implementasi dan pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah	Tahun	1	49.980.500	1	69.972.700,00	1	73.471.335,00	1	77.144.901,75	1	81.002.146,84	1	85.052.254,18	1	386.643.337,77	
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	%	3,30	640.000.000	3,50	1.320.000.000	3,75	1.386.000.000	4,00	1.455.300.000	4,25	1.528.065.000	4,50	1.604.468.250	4,50	7.293.833.250	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terkelolanya barang milik daerah	%	100	640.000.000	100	1.320.000.000	100	1.386.000.000	100	1.455.300.000	100	1.528.065.000	100	1.604.468.250	100	7.293.833.250	
	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya standar harga	Buku	1	400.000.000	1	420.000.000,00	1	441.000.000,00	1	463.050.000,00	1	486.202.500,00	1	510.512.625,00	5	2.320.765.125,00	
	5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah	Kegiatan	1	50.000.000	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,50	5	828.844.687,50	
	5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya penilaian barang milik daerah	Kegiatan	1	40.000.000	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,50	5	828.844.687,50	

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	Tahun	0	-	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.250.000,00	1	115.762.500,00	1	121.550.625,00	5	552.563.125,00
	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Tahun	1	50.000.000	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,50	5	828.844.687,50
	5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Kegiatan	0	-	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.250.000,00	1	115.762.500,00	1	121.550.625,00	1	552.563.125,00
	5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik	Tersusunnya laporan barang milik	Dokumen	0	-	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.250.000,00	1	115.762.500,00	1	121.550.625,00	1	552.563.125,00

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Daerah	daerah															
	5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terbinanya pengelolaan barang milik daerah	Kegiatan	1	100.000.000	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,50	1	828.844.687,50
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap APBD	%	12,90	2.497.912.600	19,00	5.825.167.650	19,25	6.162.565.443	19,50	6.521.447.066	19,75	6.903.348.106	20,00	7.309.927.066	20,00	32.722.455.331
			Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	%	2,00		3,00		4,00		5,00		6,00		7,00		7,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Kegiatan	7	2.497.912.600	14	5.825.167.650	14	6.162.565.443	14	6.521.447.066	14	6.903.348.106	14	7.309.927.066	70	32.722.455.331
	5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kegiatan	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Kegiatan	1	299.999.900	1	464.999.845,00	1	488.249.837,25	1	512.662.329,11	1	538.295.445,57	1	565.210.217,85	5	2.569.417.674,78
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Kegiatan	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00	5	610.510.000,00
	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Kegiatan	1	599.959.700	1	899.939.550,00	1	944.936.527,50	1	992.183.353,88	1	1.041.792.521,57	1	1.093.882.147,65	5	4.972.734.100,59
	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Kegiatan	1	149.999.800	1	164.999.780,00	1	181.499.758,00	1	199.649.733,80	1	219.614.707,18	1	241.576.177,90	5	1.007.340.156,88

T u j u a n / S a s a r a n	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	S a t u a n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksanan ya pengolahan, pemeliharaa n, dan pelaporan basis data pajak daerah	Kegiatan	1	73.010.000	1	80.311.000,00	1	88.342.100,00	1	97.176.310,00	1	106.893.941,00	1	117.583.335,10	5	490.306.686,10		
	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksanan ya penilaian PBBP2 serta BPHTB	Kegiatan	1	299.996.500	1	1.049.987.750,00	1	1.102.487.137,50	1	1.157.611.494,38	1	1.215.492.069,09	1	1.276.266.672,55	5	5.801.845.123,52		
	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksanan ya penetapan wajib pajak daerah	Kegiatan	0	-	1	250.000.000,00	1	262.500.000,00	1	275.625.000,00	1	289.406.250,00	1	303.876.562,50	5	1.381.407.812,50		
	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksanan ya pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Kegiatan	0	-	1	250.000.000,00	1	262.500.000,00	1	275.625.000,00	1	289.406.250,00	1	303.876.562,50	5	1.381.407.812,50		

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Kegiatan	0	-	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	1	330.750.000,00	1	347.287.500,00	1	364.651.875,00	5	1.657.689.375,00
	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah	Kegiatan	0	-	1	400.000.000,00	1	420.000.000,00	1	441.000.000,00	1	463.050.000,00	1	486.202.500,00	5	2.210.252.500,00
	5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya penyelesaian keberatan pajak daerah	Kegiatan	0	-	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	1	330.750.000,00	1	347.287.500,00	1	364.651.875,00	5	1.657.689.375,00
	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Kegiatan	1	524.968.200	1	787.452.300,00	1	826.824.915,00	1	868.166.160,75	1	911.574.468,79	1	957.153.192,23	5	4.351.171.036,76

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							2021		2022		2023		2024		2025				2026	
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp			T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Kegiatan	1	549.978.500	1	577.477.425,00	1	635.225.167,50	1	698.747.684,25	1	768.622.452,68	1	845.484.697,94	5	3.525.557.427,37		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai 5 (lima) tahun mendatang perlu ditetapkan indikator kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Tingkat keberhasilan pencapaian tersebut sangat didukung oleh profesionalitas seluruh jajaran organisasi, karena profesionalitas di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah merupakan faktor kunci yang dapat memajukan organisasi sehingga bisa bergerak lebih cepat untuk menuju keberhasilan dalam merealisasikan program-program pembangunan yang diamanatkan untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, sesuai pula dengan tugas dari perangkat daerah ini membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

Adapun indikator kinerja dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1.

INDIKATOR KINERJA BPKPAD YANG MENGACU PADA

TUJUANDAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja
	Awal RPJMD (Tahun 2021)	Tahun - 1 (2022)	Tahun - 2 (2023)	Tahun - 3 (2024)	Tahun - 4 (2025)	Tahun - 5 (2026)	Pada Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8
Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel 7.2.
INDIKATOR PROGRAM BPKPAD YANG MENGACU PADA
TUJUANDAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun - 1 (2022)	Tahun - 2 (2023)	Tahun - 3 (2024)	Tahun - 4 (2025)	Tahun - 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN/BIDANG KEUANGAN							
Indeks Reformasi Birokrasi							
Persentase SiLPA terhadap APBD	-	0,018	0,017	0,016	0,015	0,014	0,014
Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	-	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,50
Persentase PAD terhadap APBD	-	19,00	19,25	19,50	19,75	20,00	20,00
Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	-	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	7,00

BAB VIII PENUTUP

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026 disusun sebagai dokumen perencanaan yang berdimensi 5 tahun-an dalam rangka mengoperasionalkan RPJMD Kota Binjai yang diselaraskan dengan tugas, fungsi dan tata kerja dalam bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah.

Melalui Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman bagi masing-masing bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dalam rangka menyusun program/kegiatan tahunan dengan lebih fokus pada *output* dan *outcome* yang ditargetkan guna mendukung mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan efisien dan efektif. Sehingga program/kegiatan yang disusun Badan Pengelolaa Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai sudah memadai dan mendukung untuk mencapai sasaran hasil yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Binjai.

Lampiran 1

Mengidentifikasi indikator-indikator tujuan dan sasaran dengan metode SMART:

No.	Indikator	Spesific	Measurable	Achieveable	Relevant	Time-Bound
1	Opini Laporan Keuangan	LKPD	Penilaian Atas LKPD	Wajar Tanpa Pengecualian	LKPD yang Akuntabel	1 Tahun
2	Menurunnya persentase SiLPA terhadap APBD	SiLPA	Persentase SiLPA terhadap APBD	Nihil SiLPA	Tertibnya Pengelolaan Keuangan	1 Tahun
3	Persentase Kontribusi pemanfaatan Aset terhadap PAD	Nilai Pemanfaatan Aset	Persentase Nilai Pemanfaatan Aset terhadap PAD	Pemanfaatan Aset Meningkat	Termanfaatkannya Aset Pemko	1 Tahun
4	Persentase PAD terhadap APBD	Realisasi PAD	Persentase PAD terhadap APBD	Peningkatan PAD	Meningkatnya Realisasi Pendapatan Daerah	1 Tahun
5	Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatnya Realisasi Pajak dan Retribusi	Persentase pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah	Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatnya Realisasi Pendapatan Daerah	1 Tahun

Lampiran 2

TABEL T.C 29
INDIKATOR PROGRAM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
URUSAN/BIDANG KEUANGAN.....									
1	Indeks Reformasi Birokrasi								
1.1	Menurunnya persentase SiLPA terhadap APBD		0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14
1.2	Opini Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.3	Kontribusi Pemanfaatan Aset Terhadap PAD		3,25	3,5	3,75	4,00	4,25	4,5	4,5
1.4	Persentase PAD terhadap APBD		18,75	19,00	19,25	19,50	19,75	20,00	20,00
1.5	Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah		2,75	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	7,00